



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan



TAHUN 2017

Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan amanat dalam peraturan tersebut di atas, LKjIP Kota Balikpapan tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja Kota Balikpapan 2017 yang diukur berdasarkan target indikator kinerja yang bermuara pada capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan atas penggalan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 yang bermuara pada pencapaian Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Wali Kota Balikpapan tahun 2017.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, Wali Kota Balikpapan menetapkan 10 sasaran dan 20 indikator kinerja (IKU) berikut targetnya. Pencapaian sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh 102 program prioritas dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah lingkup Kota Balikpapan tahun 2017.

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran terhadap indikator kinerja (IKU) Kota Balikpapan tahun 2017 per sasaran strategisnya, maka capaian sasaran strategis (sasaran kinerja) Kota Balikpapan tahun 2017 dinyatakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**" pada tahun 2017 sebesar 100,73% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rata-rata Lama Sekolah dengan realisasi 10,55 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 13,80 Tahun. Berdasarkan capaian 2 (dua) IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui target yang diperjanjikan.
2. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan**" pada tahun 2017 sebesar 100,01% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Harapan Hidup. dengan realisasi 73,98 Tahun. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TERCAPAI**" karena melampaui target yang diperjanjikan.
3. Capaian Sasaran Strategis "**Menurunnya Jumlah Pengangguran**" pada tahun 2017 sebesar 76,79% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 10,39% dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja dengan realisasi 63,38%. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan "**TIDAK TERCAPAI**" karena kurang dari target yang diperjanjikan khususnya pencapaian IKU Tingkat Pengangguran.
4. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan**" pada tahun 2017 sebesar 94,59% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama

- (IKU) yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 78,57, Tingkat Kemiskinan dengan realisasi 2,82 dan Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi 91,45. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TIDAK TERCAPAI**” karena kurang dari target yang diperjanjikan khususnya pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan.
5. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**" pada tahun 2017 sebesar 103,50% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi 61,25. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TERCAPAI**” karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
 6. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan**" pada tahun 2017 sebesar 111,46% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu *Livable City Index* dengan realisasi 80,81. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TERCAPAI**” karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
 7. Capaian Sasaran Strategis "**Terwujudnya Infrastruktur yang Handal**" pada tahun 2017 sebesar 104,13% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar dengan realisasi 78,10. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TERCAPAI**” karena melampaui dari target yang diperjanjikan.
 8. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat**" pada tahun 2017 sebesar 104,68% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Gini Ratio dengan realisasi 0,31 dan PDRB Perkapita dengan realisasi Rp. 137.07 Juta. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TERCAPAI**” karena melampaui dari target yang diperjanjikan, tetapi perlu upaya peningkatan pada IKU PDRB Perkapita yang kurang memenuhi capaian target.
 9. Capaian Sasaran Strategis "**Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**" pada tahun 2017 sebesar 99,20% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu PDRB Non Migas dengan realisasi Rp. 42,28 Triliun. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TIDAK TERCAPAI**” karena kurang dari target yang diperjanjikan.
 10. Capaian Sasaran Strategis "**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**" pada tahun 2017 sebesar 113% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Opini Laporan Keuangan dengan realisasi WTP (diasumsikan tercapai), Indeks Persepsi Korupsi dengan realisasi 6,64, Survey Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 78,69, Nilai Evaluasi LAKIP dengan realisasi 66,18 (B), Penilaian Kepatuhan dengan realisasi 83,19 dan Indeks Profesionalitas ASN dengan realisasi 87,73. Berdasarkan capaian IKU tersebut dinyatakan “**TERCAPAI**” karena melampaui dari target yang diperjanjikan, tetapi perlu upaya peningkatan capaian pada IKU Survey Kepuasan Masyarakat yang kurang memenuhi capaian target.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan tahun 2017. LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 menyajikan gambaran informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Walikota Balikpapan tahun 2017, sekaligus pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

LKjIP tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017. Pedoman penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (*stakeholder*) yang berwenang untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| COVER SAMPUL DALAM..... | 1 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| KATA PENGANTAR..... | 4 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| DAFTAR TABEL | 6 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 7 |
| BAB I PENDAHULUAN | 8 |
| A. LANDASAN HUKUM | 8 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 10 |
| C. DATA ORGANISASI..... | 10 |
| D. SISTEMATIKA PENULISAN | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 14 |
| A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN | 14 |
| B. PERJANJIAN KINERJA | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 27 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 75 |
| C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN | 83 |
| BAB IV PENUTUP..... | 87 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan..... | 18 |
| Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2017 | 21 |
| Tabel 2.3. Misi dan Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2017..... | 22 |
| Tabel 3.1. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017..... | 32 |
| Tabel 3.2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 dan tahun 2016 | 55 |
| Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2017 | 75 |
| Tabel 3.4 Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 | 76 |
| Tabel 3.5 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 | 76 |
| Tabel 3.6 Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Tahun 2016-2021 | 76 |
| Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017..... | 76 |
| Tabel 3.8 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 | 77 |
| Tabel 3.9 Target dan Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan | 77 |
| Tabel 3.10. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017..... | 83 |
| Tabel 4.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2017..... | 87 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar 3.1. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Huruf Tahun 2017 | 33 |
| Gambar 3.2. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017 | 34 |
| Gambar 3.3. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU AHH 2017 | 35 |
| Gambar 3.4. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017..... | 36 |
| Gambar 3.5. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017..... | 37 |
| Gambar 3.6. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017..... | 39 |
| Gambar 3.7. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2017 | 40 |
| Gambar 3.8. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017..... | 41 |
| Gambar 3.9. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017..... | 42 |
| Gambar 3.10. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU <i>Livable City Index</i> Tahun 2017 | 42 |
| Gambar 3.11. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indek Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah Tahun 2017 | 44 |
| Gambar 3.12. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Gini Ratio Tahun 2017 | 45 |
| Gambar 3.13. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai PDRB Perkapita Tahun 2017 | 46 |
| Gambar 3.14. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU PDRB Perkapita ... | 48 |
| Gambar 3.15. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2017 | 49 |
| Gambar 3.16. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017 | 50 |
| Gambar 3.17. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 | 51 |
| Gambar 3.18. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2017 | 52 |
| Gambar 3.19. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penilaian Kepatuhan Tahun 2017 | 53 |
| Gambar 3.20. | Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017 | 54 |
| Gambar 3.21. | Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2017 | 82 |

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Walikota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LKjIP yang disusun dan dilaporkan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2017, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2017.

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2017 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Kota Balikpapan tahun 2017 adalah kurang lebih sama dengan LKjIP tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan tahun-tahun berikutnya.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 terhadap target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 ;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017 dan ;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012-2016 (5 tahun) dengan target kinerja 2016-2021 (5 tahun) yang direncanakan (RPJMD Kota Balikpapan).

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP tersebut adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. DATA ORGANISASI

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur susunan perangkat daerah Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

4. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A , menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
 8. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
 9. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;
 14. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
 15. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 17. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan yang terdiri atas:
1. Kecamatan Balikpapan Barat dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Balikpapan Kota dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Balikpapan Utara dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Tipe A; dan
 6. Kecamatan Balikpapan Timur dengan Tipe A.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan tahun 2017, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017;
2. Membandingkan antara realisasi / capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016;
3. Membandingkan realisasi kinerja 2017 dengan target jangka menengah (5 tahun) yang terdapat dalam dokumen RPJMD periode 2016-2021;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional

(yang ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keputusan Walikota Tentang Indikator Kinerja Utama
4. Hasil Reviu Inspektorat Kota Balikpapan Terhadap LKjIP tahun 2017
5. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
6. Foto-foto kegiatan peningkatan kualitas dokumen SAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 2005 – 2025.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkauan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* kunci. Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021 dan merupakan pertama kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2016-2021.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2017.

1. VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN

Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

- a. **KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan *Coastal Road*, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.
- b. **KOTA NYAMAN DIHUNI** (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);

- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
 - 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
 - 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
 - 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.
- c. **KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN** adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk memwadhahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.
- d. **MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai berikut :
- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
 - 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
 - 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
 - 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan Visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021, sebagai berikut :

MISI 1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi

| | |
|--------------------|--|
| Tujuan Ke-1 | : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing. |
| Sasaran | : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan. |
| Tujuan Ke-2 | : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan |
| Sasaran | : 2. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan. |
| Tujuan Ke-3 | : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan. |
| Sasaran | : 3. Menurunnya jumlah pengangguran; 4. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. |

MISI 2

Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan

| | |
|--------------------|--|
| Tujuan Ke-4 | : Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan. |
| Sasaran | : 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 6. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. |

MISI 3

Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif

| | |
|--------------------|---|
| Tujuan Ke-5 | : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur. |
| Sasaran | : 7. Terwujudnya infrastruktur yang handal; |

MISI 4

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

| | |
|--------------------|--|
| Tujuan Ke-6 | : Menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. |
| Sasaran | : 8. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. |
| Tujuan Ke-7 | : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau. |
| Sasaran | : 9. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. |

MISI 5

Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

| | |
|--------------------|---|
| Tujuan Ke-8 | : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima. |
| Sasaran | : 10. Tata kelola pemerintahan yang baik. |

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka perlu disusun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan IKU Kota Balikpapan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Rata-rata lama sekolah (tahun) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan | 1. Angka Harapan Hidup (tahun) | Dinas Kesehatan, RSUD Kota Balikpapan, RSKB Sayang Ibu |
| 3 | Menurunnya jumlah pengangguran | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | 2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen) | Dinas Tenaga Kerja |
| 4 | Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan | 1. Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| | | 2. Tingkat Kemiskinan (persen) | Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 3. Indeks Pembangunan Gender (indeks GR) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|--|--|
| 6 | Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan | 1. <i>Livable City Index</i> (indeks) | Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda |
| 7 | Terwujudnya infrastruktur yang handal | 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala) | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan penataan Ruang |
| 8 | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat | 1. Indeks Gini Ratio (indeks gini ratio) | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah |
| | | 2. PDRB perkapita (persen) | Bappeda Litbang |
| 9 | Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 1. PDRB non migas (persen) | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup |
| 10 | Tata kelola pemerintahan yang baik | 1. Opini laporan keuangan (Kategori) | Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | 2. Indeks Persepsi Korupsi (indeks) | Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | 3. Survey Kepuasan Masyarakat (indeks SKM) | Bappeda Litbang |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------|---|--|
| | | 4. Nilai Evaluasi LAKIP (skor Kinerja) | Bappeda Litbang |
| | | 5. Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna) | Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah |
| | | 6. Indeks Profesionalitas ASN (indeks) | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah se Kota Balikpapan |

Sumber : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara Walikota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transpa-ransi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/-kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja perangkat daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini memuat informasi tentang sasaran strategis, di mana setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Penetapan target IKU tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 kepada Menteri PAN dan RB disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2017

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Rata-rata lama sekolah (tahun) | 10,45 |
| | | 2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,73 |
| 2 | Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan | 1. Angka Harapan Hidup (tahun) | 73,96 |
| 3 | Menurunnya jumlah pengangguran | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,55% |
| | | 2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 63,28 |
| 4 | Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan | 1. IPM | 78,33 |
| | | 2. Tingkat Kemiskinan (%) | 2,34 |
| | | 3. Indeks Pembangunan Gender | 91 |
| 5 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 59,18 |
| 6 | Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan | 1. <i>Livable City Index</i> | 72,5 |
| 7 | Terwujudnya infrastruktur yang handal | 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala) | 75,00 |
| 8 | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat | 1. Indeks Gini Ratio | 0,34 |
| | | 2. PDRB perkapita (Rp. Juta) | 137.51 |
| 9 | Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 1. PDRB non migas (Rp. Triliun) | 42.62 |
| 10 | Tata kelola pemerintahan yang baik | 1. Opini laporan keuangan (Kategori) | WTP |
| | | 2. Indeks Persepsi Korupsi | 6,62 |
| | | 3. Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM) | 79,56 |
| | | 4. Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat) | CC |
| | | 5. Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna) | 55 |
| | | 6. Indeks Profesionalitas ASN | 83 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut di atas, target capaian IKU akan didukung oleh program dan anggaran tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Salinan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB tahun 2017 disajikan dalam lampiran LKjIP ini.

Tabel 2.3. Misi dan Program Pencapaian Kinerja Tahun 2017

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran |
|------------------|---|--------------------------|
| Misi Ke-1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi | Rp 44,836,825,233 |
| 1 | Program pendidikan non formal | Rp 6,771,120,000 |
| 2 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Rp 1,025,233,500 |
| 3 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 4,766,610,000 |
| 4 | Program Pendidikan Dasar | Rp 5,219,000,000 |
| 5 | Program Pendidikan Menengah | Rp 1,588,321,233 |
| 6 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 272,475,000 |
| 7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp - |
| 8 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak | Rp - |
| 9 | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | Rp - |
| 10 | Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan | Rp 13,116,255,000 |
| 11 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 903,697,500 |
| 12 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan | Rp 325,255,000 |
| 13 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Rp 143,307,000 |
| 14 | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | Rp 4,352,965,000 |
| 15 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Rp 1,733,144,000 |
| 16 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Rp 536,384,500 |
| 17 | Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan | Rp - |
| 18 | Program Keluarga Berencana | Rp 1,877,361,000 |
| 19 | Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Rp 1,032,253,000 |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | |
|------------------|--|----------|-----------------|
| 20 | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) | Rp | 214,097,500 |
| 21 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | Rp | 461,948,000 |
| 22 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak | Rp | 497,398,000 |
| Misi Ke-2 | Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan | Rp | 126,706,848,335 |
| 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp | 912,090,000 |
| 2 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp | 126,910,000 |
| 3 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Rp | 1,309,465,000 |
| 4 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Rp | 2,125,000,000 |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Rp | 125,000,000 |
| 6 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Rp | 42,964,625,000 |
| 7 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Rp | 6,885,096,935 |
| 8 | Program Pengembangan Perumahan | Rp | 3,089,436,000 |
| 9 | Program penyediaan dan pengolahan air baku | Rp | 41,396,143,000 |
| 10 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | Rp | 2,791,000,000 |
| 11 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran | Rp | 230,109,000 |
| 12 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | | |
| 13 | Program Sarana dan Prasarana Logistik | Rp | 3,843,814,400 |
| 14 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Rp | 100,000,000 |
| 15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Rp | 30,000,000 |
| 16 | Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Rp | 1,784,990,000 |
| 17 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Rp | 452,650,000 |
| 18 | Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika | Rp | - |
| 19 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Rp | 1,273,080,000 |
| 20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Rp | 140,500,000 |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp | 16,049,270,000 |
| 22 | Program Pengelolaan Keaneka ragaman Budaya | | |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | |
|------------------|---|----------|-----------------|
| 23 | Program Pelestarian Cagar Budaya | Rp | 396,500,000 |
| 24 | PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan | Rp | 681,169,000 |
| 25 | Program Penelitian dan Pengembangan | Rp | - |
| Misi Ke-3 | Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif | Rp | 237,594,080,374 |
| 1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp | 13,462,500,000 |
| 2 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Rp | 1,326,500,000 |
| 3 | Program peningkatan pelayanan angkutan | Rp | 362,600,000 |
| 4 | Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp | 26,728,000,000 |
| 5 | Program peningkatan dan pengamanan lalulintas | Rp | 2,095,800,000 |
| 6 | Program pengendalian banjir | Rp | 26,703,022,850 |
| 7 | Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong | Rp | 6,500,000,000 |
| 8 | Program Pembangunan Pedestrian Kota | Rp | 8,500,000,000 |
| 9 | Program Keselamatan Pengguna Jalan | Rp | - |
| 10 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Rp | 820,000,000 |
| 11 | Program Penerangan Jalan Umum | Rp | 34,200,000,000 |
| 12 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Rp | 116,895,657,524 |
| Misi Ke-4 | Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif | Rp | 32,285,855,685 |
| 1 | Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | Rp | - |
| 2 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Rp | 314,050,000 |
| 3 | Program penataan struktur industri | Rp | 24,836,491,685 |
| 4 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp | 78,026,000 |
| 5 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi | Rp | 66,600,000 |
| 6 | Program penciptaan iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif | Rp | 50,000,000 |
| 7 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Rp | 100,000,000 |
| 8 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Rp | - |
| 9 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Rp | - |
| 10 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Rp | 200,000,000 |
| 11 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Rp | 93,700,000 |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | |
|------------------|---|----------|-----------------------|
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar | Rp | 250,000,000 |
| 13 | Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar | Rp | 1,199,870,000 |
| 14 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Rp | 359,600,000 |
| 15 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya | Rp | 2,288,441,000 |
| 16 | Program pengembangan destinasi pariwisata | Rp | 698,241,000 |
| 17 | Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata | Rp | 1,120,836,000 |
| 18 | Program pengembangan kemitraan | Rp | - |
| 19 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Rp | - |
| 20 | Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan | Rp | - |
| 21 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp | - |
| 22 | Program Kemudahan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal serta Perizinan | Rp | 440,000,000 |
| 23 | Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan | Rp | 190,000,000 |
| 24 | Peningkatan produksi pertanian | Rp | - |
| 25 | Peningkatan produksi Perikanan | Rp | - |
| 26 | Program Pemanfaatan Biomassa | Rp | - |
| 27 | Program Pengembangan City Gas | Rp | - |
| Misi Ke-5 | Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Rp | 44,006,552,660 |
| 1 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Rp | 4,969,232,300 |
| 2 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah | Rp | 625,450,300 |
| 3 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Rp | 1,598,250,000 |
| 4 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Rp | 2,774,330,000 |
| 5 | Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur | Rp | 1,193,407,000 |
| 6 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Rp | 3,005,975,000 |
| 7 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah | Rp | 17,092,450,000 |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Rp | 9,009,225,765 |
| 9 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | | |
| 10 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Rp | 206,300,000 |
| 11 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Rp | 1,677,950,600 |
| 12 | Program Penataan peraturan perundang-undangan | Rp | 798,713,900 |
| 13 | Program Bantuan Hukum | Rp | 539,517,795 |
| 14 | Program Perencanaan Pembangunan Bid. Pengembangan dan Perekonomian perkotaan | Rp | 465,750,000 |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | |
|---------------|--|-----------|------------------------|
| 15 | Program Perencanaan Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | Rp | 50,000,000 |
| 16 | Program Perencanaan Pengendalian Pembangunan | Rp | - |
| JUMLAH | | Rp | 485,430,162,287 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah memenuhi tuntutan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Laporan LKjIP Tahun 2017

Berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 66,19 (B). Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun 2016 yaitu dengan nilai 60,85 (B) atau meningkat 5,34 poin. Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah kota Balikpapan untuk membangun budaya kinerja birokrasi dengan berorientasi terhadap hasil sebagaimana rekomendasi

yang diharapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hasil capaian tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan uraian singkat terhadap hasil yang dicapai sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Balikpapan di Tahun 2017 telah memulai perbaikan sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen pemimpin daerah bersama dengan Kepala SKPD. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan RPJMD dimana sasaran dan indikatornya berorientasi terhadap hasil, untuk Renstra SKPD sudah mulai orientasi hasil namun belum berdampak pada program dan kegiatan yang menunjang Sasaran strategis. Pada akhirnya alokasi anggaran pada program dan kegiatan tersebut belum efektif dan efisien dalam pencapaian Sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi terjadinya pemborosan dalam penggunaan anggaran.
- b. Pelaksanaan perjanjian kinerja belum dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan serta anggaran yang digunakan. Dan perjanjian kinerja belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja eselon III dan IV.
- c. Sistem Monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.
- d. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level SKPD, namun pemanfaatan laporan kinerja tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya.
- e. Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- f. Sistem evaluasi yang dilakukan sudah mulai mengarah ke evaluasi kinerja namun belum mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan program dan memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan f, guna mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan :

1. Membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta mekanisme monev kinerja berkelanjutan.
2. Melakukan penyempurnaan sasaran dan Indikator Kinerja Utama, kepada seluruh SKPD sampai dengan indikator kinerja di level Eselon III dan IV, sehingga tercipta keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level Kota sampai ke individu pegawai.
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.

4. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan.
5. Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian rewards dan punishment. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat kinerja.
6. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian rewards dan punishment. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu diharapkan aplikasi ini dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat kinerja.

Berdasarkan rekomendasi di atas, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Balikpapan sebagai tindak lanjut antara lain :

- 1) Budaya kinerja berbasis output sudah mulai ditinggalkan dan mulai membangun budaya kinerja berbasis outcome. Reviu terhadap dokumen perencanaan, perubahan IKU dan IKI, serta monev kinerja secara triwulan terus dilakukan.
- 2) Penyusunan indikator kinerja utama pada perangkat daerah sudah dilakukan secara berjenjang dan diselaraskan sesuai IKU Walikota, Esselon II, Esselon III sampai Esselon IV. Hal ini terus dilakukan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sejak tahun 2017 dan terus berlanjut di tahun 2018. Reviu terhadap sasaran, IKU, IKI dan renaksi per SKPD dilakukan oleh Bappeda Litbang dan Bagian Organisasi, yaitu dengan melakukan asistensi per SKPD bersama nara sumber dari Biro Organisasi Provinsi Kaltim pada tanggal 6-7 Maret 2018 dan hasil reviu dari Biro Organisasi Pemprov. Kaltim dilakukan reviu ulang dengan fasilitasi oleh Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018.
- 3) Upaya untuk melakukan reviu sebagaimana rekomendasi di atas sebenarnya sudah mulai dilakukan seiring dengan proses penyempurnaan IKI dan Renaksi, serta didukung oleh penerapan aplikasi e-planning mulai tahun 2018. Penajaman terhadap indikator kinerja dan program pada SKPD sebelum diinput ke dalam e-planning telah dilakukan tahapan reviu perencanaan penyusunan RENSTRA masing-masing.

- 4) Bagian Organisasi, Bappeda Litbang dan Inspektorat Kota Balikpapan secara bersama melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja setiap SKPD sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh setiap kepala SKPD kepada Walikota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Evaluasi terhadap hasil kinerja tersebut mencakup outcome fisiknya maupun terhadap kinerja anggaran yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.
- 5) Penerapan aplikasi untuk manajemen kinerja mulai dilakukan pada tahun 2018, yaitu dengan menggunakan aplikasi SILAKIP yang mencakup siklus SAKIP secara keseluruhan sejak dari perencanaan, pengukuran, pengendalian, pelaporan sampai evaluasi kinerja secara otomatis, efisien dan efektif. Pelatihan penerapan aplikasi sudah dilakukan di Kota Balikpapan dengan nara sumber dari Bagian Organisasi Pemkot Bandung. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan keselarasan antara IKI dengan SKP dari masing-masing pegawai untuk memberikan rewards dan punishment sesuai kinerja masing-masing. Reward dan punishment sebagaimana maksud di atas adalah dengan menjadikan capaian IKI masing-masing pegawai sebagai indikator penentu dalam penghitungan pemberian TKD.
Selain rewards dan punishment di atas juga akan diusulkan kepada Wali Kota Balikpapan bagi Perangkat daerah yang dinilai memiliki prestasi dalam perbaikan budaya kinerja dan kualitas pelaporan kerjanya berupa pembelajaran atau studi tiru ke daerah-daerah yang memiliki budaya kinerja yang lebih baik.
- 6) Dalam setiap evaluasi kinerja SKPD (oleh Inspektorat) selalu diberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja tersebut secara keseluruhan sesuai siklus SAKIP.
- 7) Untuk mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan kinerja secara komprehensif, penerapan aplikasi SILAKIP akan terus dilakukan pengembangan, baik pada pengembangan modul (custom), maupun integrasi dengan berbagai aplikasi lainnya yang terkait seperti e-planning, s-monev, siomenteptra dan lain-lain. Melalui Bappeda Litbang Kota Balikpapan, pengukuran capaian kinerja IKI (internal) juga menggunakan aplikasi Sistem Kendali Capaian Kinerja Secara Berkala yang diberi nama "SIPINTAR".

2. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 22, Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terkait dengan Laporan Kinerja tahunan yang berisikan hasil dari capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun berjalan haruslah berorientasi terhadap hasil, relevan dan terukur.

Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 pasal 22 tersebut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, sebagaimana lampiran II mendeskripsikan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 bertujuan untuk memperoleh : 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29/2014 dan Permen PANRB No. 53/2014, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada 2016 sebagai akhir periode akhir pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 didasarkan atas 3 pengukuran yaitu :

- a. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 berdasarkan perbandingan target dan realisasi Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2017;
- b. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian tahun 2016 dan realisasi capaian tahun 2017; dan
- c. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 terhadap Capaian Target Akhir Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Wali Kota Balikpapan yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2017.

Target yang diperjanjikan pada tahun 2017 terdiri atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tergambar pada Bab II Laporan ini. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal yang berkewenangan dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2017 untuk 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN IKU |
|-----|--|---|--------|-----------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Rata-rata lama sekolah (tahun) | 10.45 | 10.55* | 100.96% |
| | | 2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13.73 | 13.80* | 100.51% |
| 2 | Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan | 1. Angka Harapan Hidup (tahun) | 73.96 | 73.97* | 100.01% |
| 3 | Menurunnya jumlah pengangguran | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5.55 | 10.39 | 53.42% |
| | | 2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 63.28 | 63.38 | 100.16% |
| 4 | Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan | 1. Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks) | 78.33 | 78.57 | 100.31% |
| | | 2. Tingkat Kemiskinan (%) | 2.34 | 2.82 | 120.51% |
| | | 3. Indeks Pembangunan Gender (angka indeks) | 91 | 91.45 | 100.49% |
| 5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks) | 59.18 | 61.25 | 103.50% |
| 6 | Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan | 1. <i>Livable City Index</i> (angka indeks) | 72.5 | 80.81 | 111.46% |
| 7 | Terwujudnya infrastruktur yang handal | 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (angka indeks) | 75 | 78.10 | 104.13% |
| 8 | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat | 1. Indeks Gini Ratio (angka indeks) | 0.34 | 0.31 | 109.68% |
| | | 2. PDRB perkapita (Rp. Juta) | 137.51 | 137.07 | 99.68% |
| 9 | Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 1. PDRB non migas (Rp. Triliun) | 42.62 | 42.28 | 99.20% |
| 10 | Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1. Opini laporan keuangan (Kategori) | WTP | WTP* | 100.00% |
| | | 2. Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks) | 6.62 | 6.64 | 100.30% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN IKU |
|-----|-------------------|--|---------|-----------|---------------------|
| | | 3. Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala) | 79.56 | 78.69 | 98.91% |
| | | 4. Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat) | CC (55) | B (66,19) | 120.35% |
| | | 5. Penilaian Kepatuhan (angka skala) | 55 | 83.19 | 151.25% |
| | | 6. Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks) | 83 | 87,73 | 104.82% |

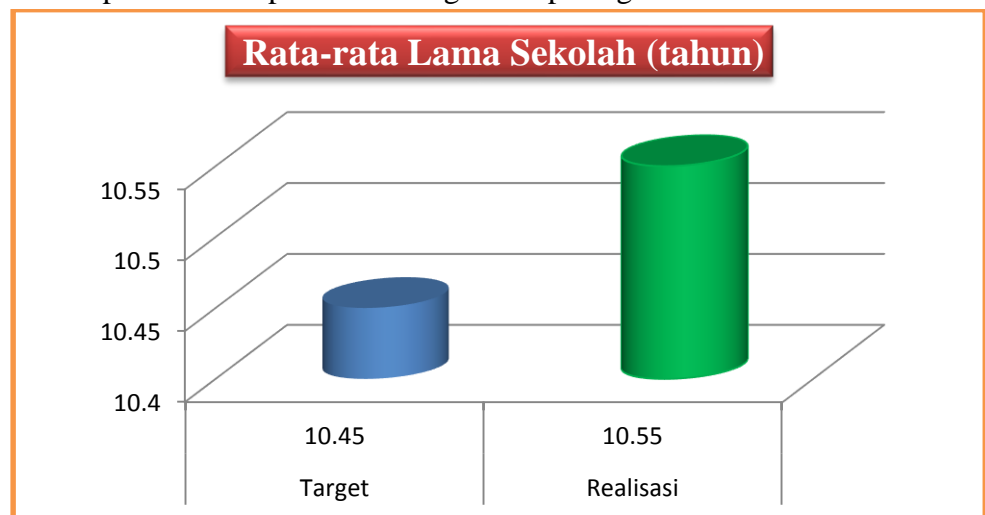
Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bappeda Litbang tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.1. dari 20 IKU yang diukur capaian kinerjanya terdapat 15 (lima belas) IKU yang tercapai atau 75% IKU yang diperjanjikan memenuhi/melebihi dari target yang ditetapkan, dan 5 IKU yang tidak tercapai atau 25% IKU yang diperjanjikan kurang dari target yang ditetapkan.

Adapun IKU yang sudah tercapai seperti dimaksud pada tabel diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Rata-rata lama sekolah (RLS)

Target IKU RLS sebesar 10,45% sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 10,55% (data proyeksi BPS). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 100,96% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” di Kota Balikpapan dengan IKU RLS “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini



Gambar 3.1

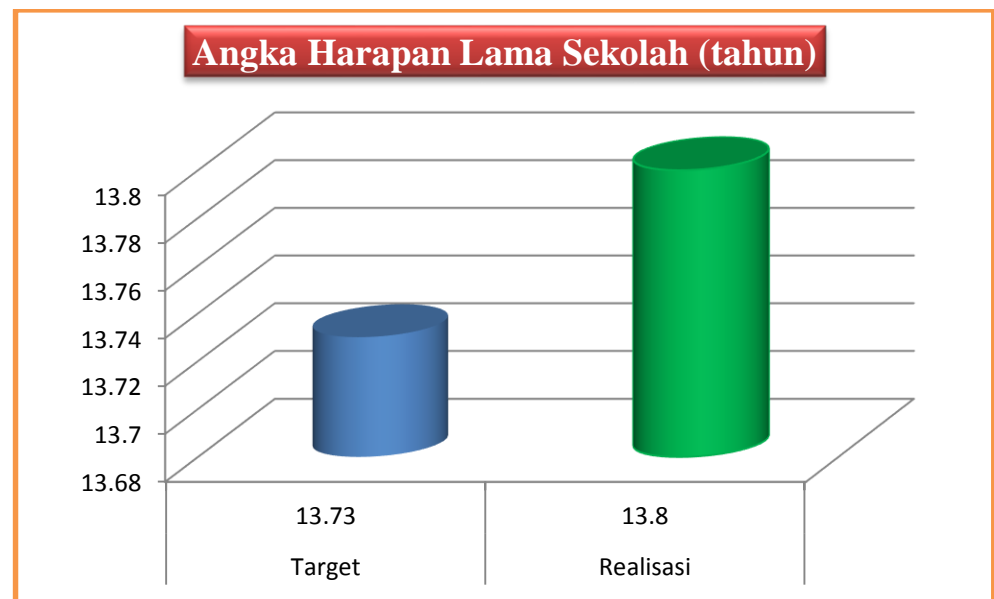
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017

Ketercapaian IKU RLS sebesar 100,96% menunjukkan keberhasilan pemerintah kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2017, keberhasilan tersebut ditinjau dari jumlah tahun yang digunakan masyarakat dalam menjalani pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi S2/S3.

Berdasarkan Keberhasilan capaian realisasi RLS tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Target IKU AHLS sebesar 13,73 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai Realisasi sebesar 13,80 (data proyeksi BPS). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 100,51% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” di Kota Balikpapan dengan IKU AHLS “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.2

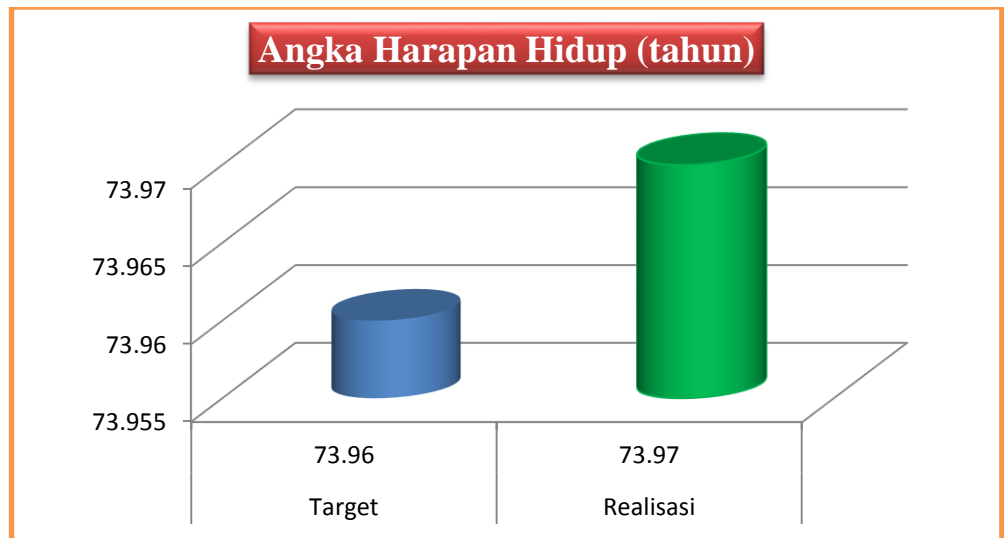
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017

Capaian IKU AHLS sebesar 100,51% menunjukkan keberhasilan pemerintah kota Balikpapan bersama perangkatnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2017, keberhasilan tersebut ditinjau dari waktu tempuh pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat kota Balikpapan untuk menerima layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, lanjutan menengah dan lanjutan atas hingga ketinggian perguruan tinggi.

Berdasarkan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Target IKU AHH sebesar 73,96 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai Realisasi sebesar 73,97 (data proyeksi BPS). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 100,01% artinya capaian sasaran strategis “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan” di Kota Balikpapan dengan IKU AHH “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.3

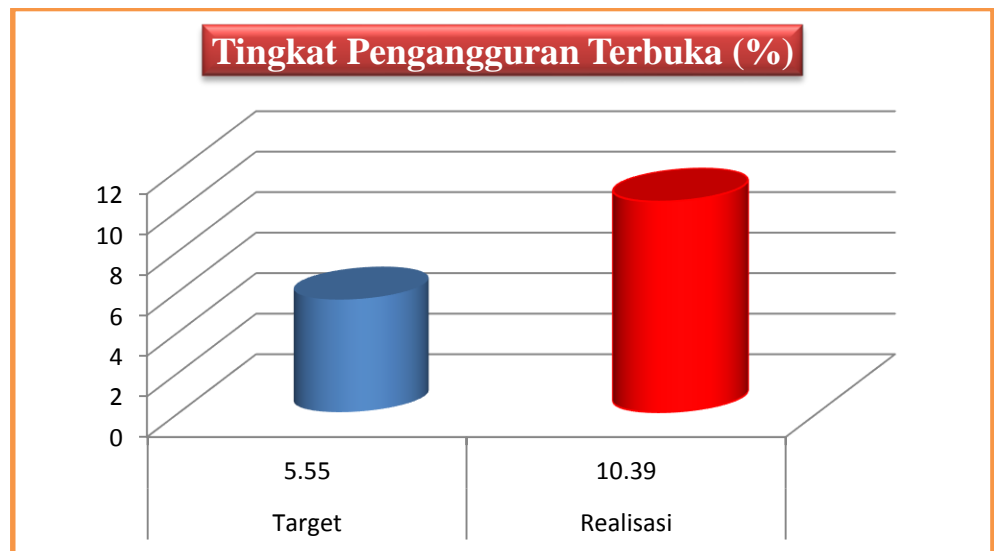
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Angka Harapan hidup Tahun 2016

Capaian IKU AHH sebesar 100,01% menunjukkan keberhasilan pemerintah kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2017, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Berdasarkan capaian tersebut, maka pemerintah kota bersama perangkat daerah perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal tersebut perlu tersedianya informasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan secara murah dan dapat dijangkau untuk semua kalangan masyarakat di Kota Balikpapan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target IKU TPT sebesar 5,55% sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 10,39% (data proyeksi BPS). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 53,42% artinya capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan IKU TPT “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.4

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017

Capaian kinerja IKU TPT sebesar 53,42% merupakan ketidak keberhasilan pemerintah kota dalam memecahkan permasalahan pada urusan ketenagakerjaan di kota Balikpapan. Hal ini terjadi karena :

- Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa total pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja sangat rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2017.
- Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.
- Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2017. Besarnya pemutusan hubungan kerja terjadi pada sektor migas dan pertambangan, sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja tersebut memberikan sumbangan pada tingkat pengangguran terbuka.
- Ketersediaan angkatan kerja yang kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain

jumlah angkatan kerja yang berasal dari luar kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan.

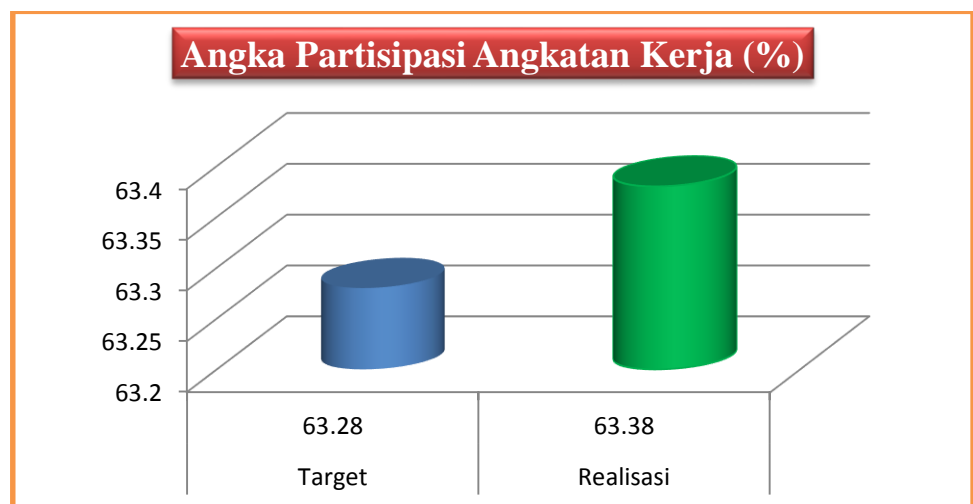
- e. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada IKU TPT, maka pemerintah kota berupaya :

- a. Menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan di daerah.
- b. Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya.
- c. Membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja.
- d. Menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah.
- e. Melaksanakan review dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target IKU TPAK sebesar 63,28% sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 63,38%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU sebesar 100,16% artinya capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan IKU TPT “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.5

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017

Capaian IKU sebesar 100,16% merupakan *add value* bagi pemerintah kota sehubungan dengan tersedianya potensi angkatan kerja diusia produktif, hal ini berarti pemerintah kota Balikpapan telah memasuki bonus demografi. Bonus demografi adalah bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tersebut perlu dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun disisi lain apabila bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan secara baik maka akan menimbulkan peluang efek negatif yaitu banyaknya usia produktif yang tidak memiliki pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan serta kurangnya kesehatan dan juga gizi yang cukup. Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Selain itu masyarakat juga harus mendukung program Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah kota perlu menindaklanjuti dan mengupayakan perkuatan yang berfokus pada :

- a. Investasi SDM (Sumber Daya Manusia) Berkualitas.
- b. Meningkatkan Pendidikan.
- c. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja.
- d. Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai.
- e. Memperkuat Investasi di bidang Kesehatan.
- f. Meningkatkan Produksi Pangan.
- g. Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target IKU IPM sebesar 78,33 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 78,57. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU perbandingan antara target dan realisasi sebesar 100,31%. Sejalan dengan capaian kinerja IPM diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.6.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017

Capaian IKU IPM sebesar 100,31% menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan telah berhasil membangun kualitas hidup manusia khususnya penduduk kota Balikpapan tahun 2017. Keberhasilan kualitas hidup manusia yang dicapai memberikan arti bahwa penduduk kota Balikpapan pada umumnya telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

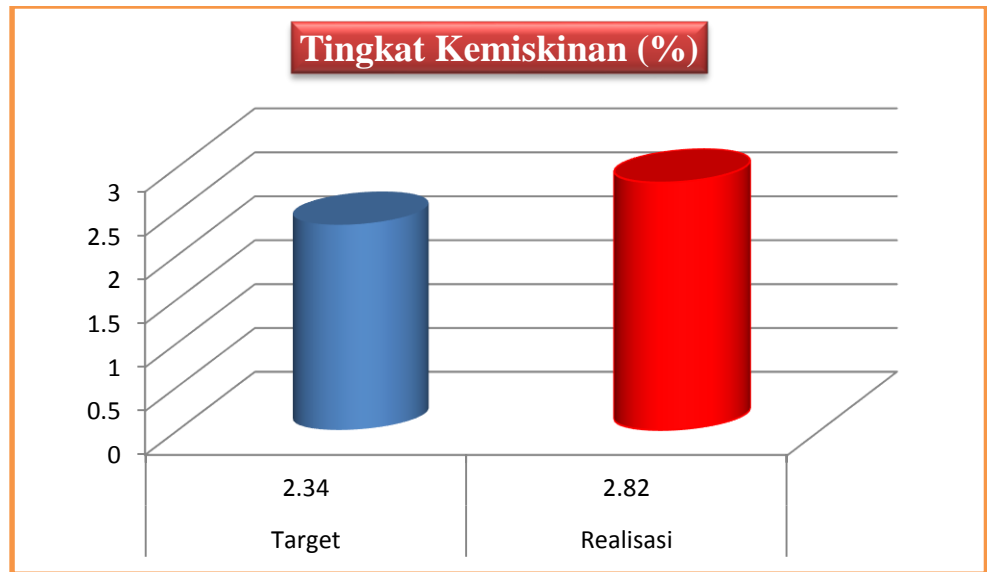
Upaya tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada tahun 2017 adalah :

- Memberikan akses layanan yang mampu memberikan layanan seluas-luasnya ditinjau dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kota Balikpapan.
- Meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
- Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat kota Balikpapan.

7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target IKU TKm sebesar 2,43% sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 2,82%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU TKm antara target dan realisasi sebesar 82,98%. Sejalan dengan capaian kinerja TKm diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK

TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.7

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2017

Capaian IKU TKm sebesar 82,98% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan kurang berhasil dalam menekan Tingkat Kemiskinan di kota Balikpapan sesuai dengan target TKm sebesar 2,43% pada tahun 2017.

Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan jumlah penduduk miskin Balikpapan sampai akhir 2016 mencapai 17.550 jiwa dengan TKm sebesar 2,81%. Kondisi sampai dengan akhir tahun 2017 TKm mencapai 2,82% artinya target kinerja TKm pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Peningkatan TKm disumbang oleh faktor jumlah penduduk kota Balikpapan yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) sampai akhir tahun 2017.

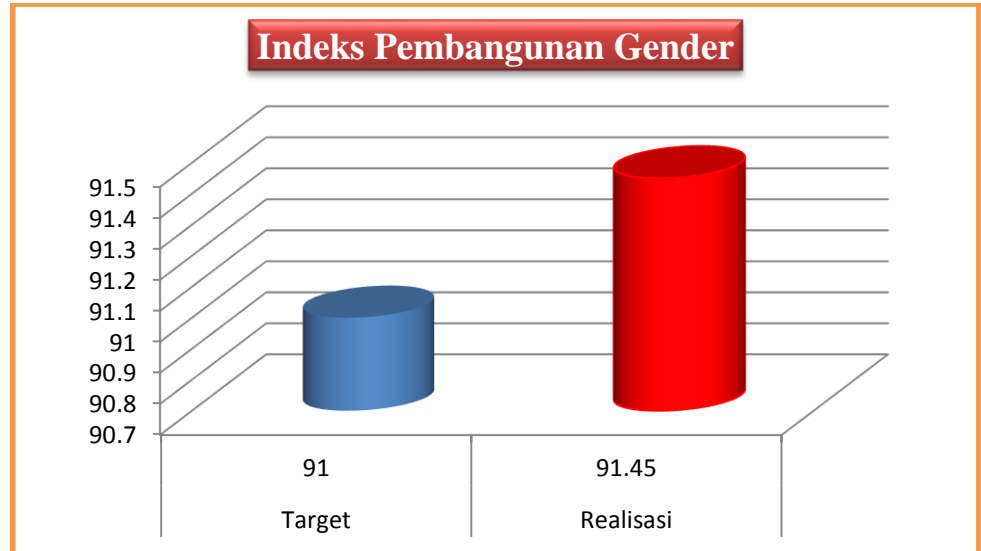
Upaya tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU TKm pada tahun 2017 adalah :

- Menekan laju pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTk).
- Mengatasi tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk atau rasio gini di kota Balikpapan.
- Mengendalikan inflasi.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU IPG sebesar 91% sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 90,11%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IPG antara target dan realisasi sebesar 99,02%. Sejalan dengan

capaian kinerja IPG diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.8

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017

Capaian IKU IPG sebesar 100,49% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia ditinjau dari ketimpangan gender di kota Balikpapan sesuai dengan target angka IPG sebesar 91 pada tahun 2017.

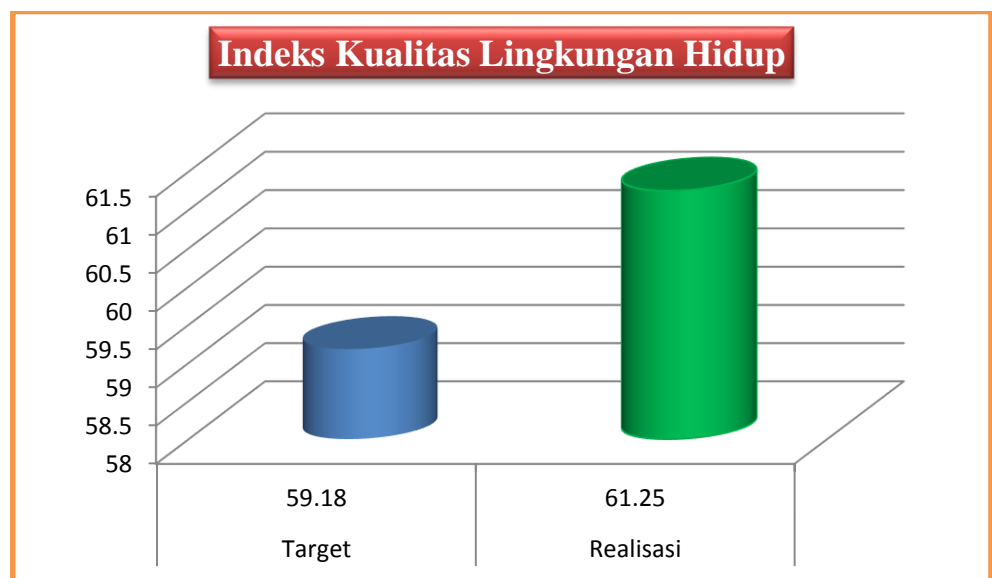
Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian IPG kota Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 89,97, tahun 2016 angka indeks capai sebesar 90,11 dan capaian angka IPG tahun 2017 adalah 91,45* (data proyeksi) Berdasarkan realisasi tersebut capaian IPG kota Balikpapan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,34 poin. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja IPG tahun 2017 (angka proyeksi) tersebut menunjukkan kesenjangan antar gender berpredikat sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPG pada tahun 2017 adalah pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, meminimalisasi tingkat kekerasan bagi perempuan dalam rumah tangga, sosialisasi dan

kampanye pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target IKU IKLH sebesar 59,18% sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 61,25%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IKLH antara target dan realisasi sebesar 103,50%. Sejalan dengan capaian kinerja IKLH diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.9.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017

Capaian IKU IKLH sebesar 103,50% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Balikpapan yang melampaui dari target angka IKLH sebesar 59,18 pada tahun 2017.

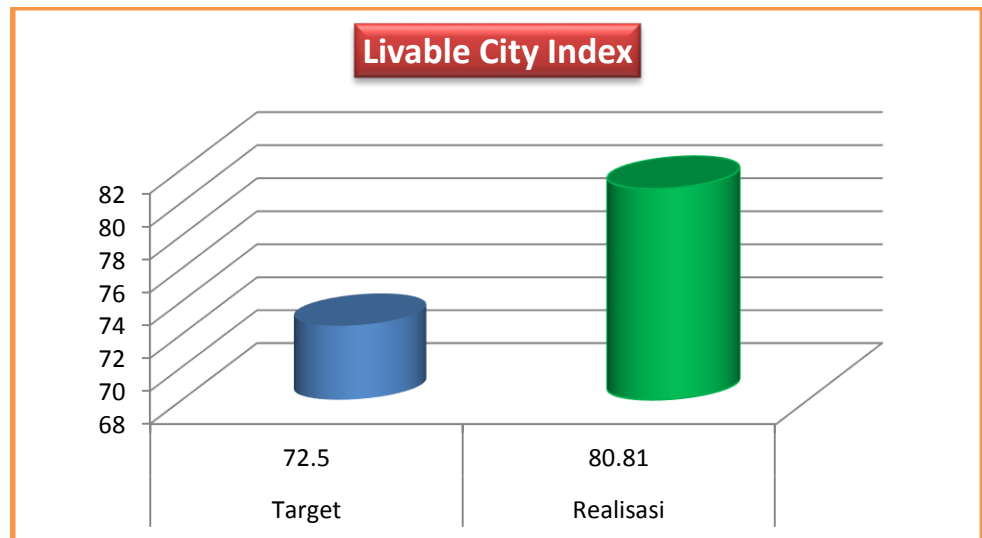
IKLH dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. Capaian IKLH tahun 2015 sebesar 63,88; tahun 2016 sebesar 62,45; dan tahun 2017 sebesar 61,25. Sehubungan dengan capaian realisasi kinerja IKLH tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,2 poin pada tahun 2017 dibandingkan tahun capaian 2016. Penurunan capaian tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi atas kualitas air, udara dan tutupan hutan/lahan yang mengalami tekanan negatif oleh aktivitas masyarakat dan usaha di kota Balikpapan. Pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan usaha (kantor, restoran, warung, hotel dll) dan limbah B3, pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengupasan lahan yang kurang terkendali.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IKLH pada tahun 2017 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan lingkungan, pengembangan kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

10. *Livable City Index (LCI)*

Target IKU LCI sebesar 72,50 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 80,81. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU LCI antara target dan realisasi sebesar 111,46%. Sejalan dengan capaian kinerja LCI diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.10.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU *Livable City Index* Tahun 2017

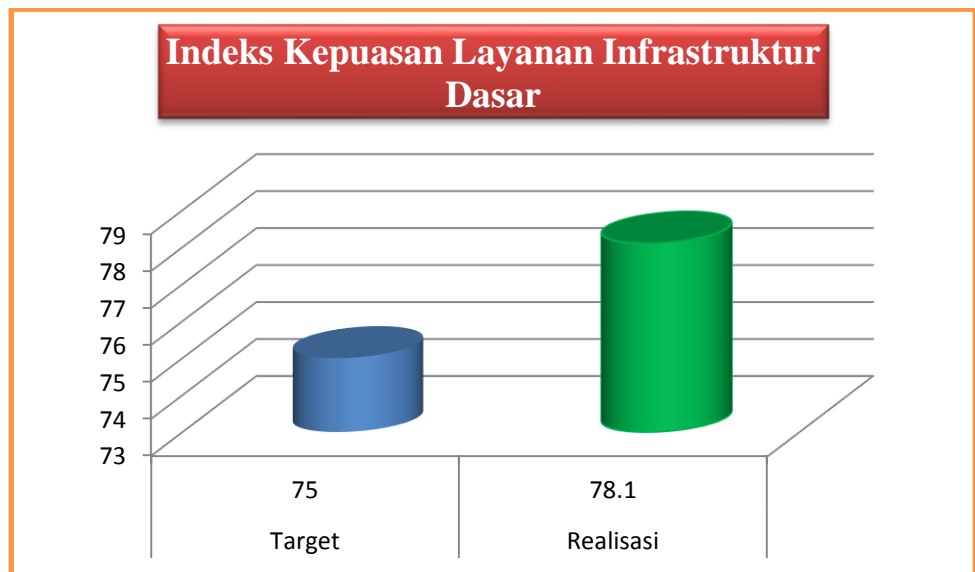
Capaian IKU LCI sebesar 111,46% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kenyamanan yang didasarkan atas persepsi masyarakat di kota Balikpapan yang

melampaui dari target angka LCI sebesar 72,5 pada tahun 2017. Angka capaian LCI tahun 2017 tersebut diukur berdasarkan metode kualitatif yang dilaksanakan oleh ikatan ahli perencanaan Indonesia.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU LCI pada tahun 2017 adalah berfokus dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan terhadap layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Target IKU IKLI sebesar 75 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 78,10. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IKLI antara target dan realisasi sebesar 104,13%. Sejalan dengan capaian kinerja IKLI diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.11.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2017

Capaian IKU IKLI sebesar 104,13% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di kota Balikpapan yang melampaui dari target angka IKLI sebesar 75 pada tahun 2017. Angka capaian IKLI tahun 2017 diukur berdasarkan kepuasan masyarakat kota Balikpapan pada sektor infrastruktur yang meliputi :

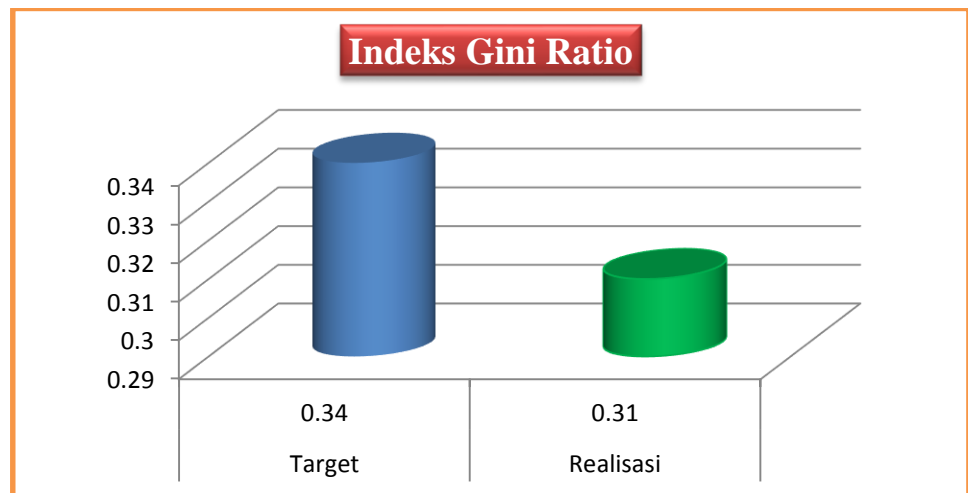
1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);

3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IKLI pada tahun 2017 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.

12. Indeks Gini Ratio (GR)

Target IKU GR sebesar 0,34 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 0,31. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IKLI antara target dan realisasi sebesar 109,68%. Sejalan dengan capaian kinerja GR diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.12.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Gini Ratio Tahun 2017

Berdasarkan capaian IKU tersebut, untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Angka koefisien gini Ratio kota Balikpapan dari selama periode 2008-2014 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien gini rasio maka kota Balikpapan berada diketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan tahun

2011 -2014 dibawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2017, berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian GR kota Balikpapan mencapai 0,31, angka capaian tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah, dimana pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan pendapatan.

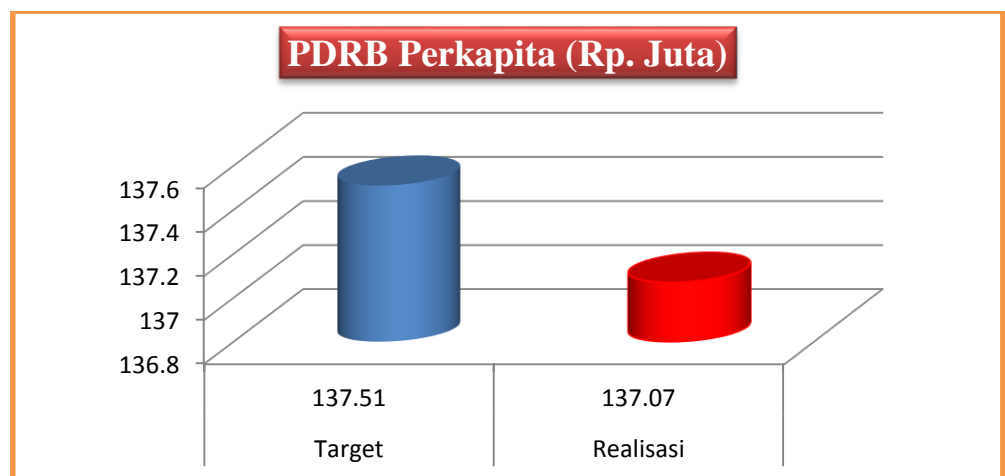
Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU GR pada tahun 2017 adalah:

- Pengendalian tingkat kemiskinan dan distribusi bantuan sosial.
- Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja.
- Menciptakan lapangan kerja baru.
- Menciptakan wirausaha secara missal.

13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Target IKU PDRB Perkapita sebesar Rp. 137,51 Juta sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar Rp. 137,07 Juta. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU PDRB Perkapita antara target dan realisasi sebesar 99,68%. Sejalan dengan capaian kinerja PDRB Perkapita diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2017. Permasalahan tidak tercapainya IKU PDRB Perkapita dikarenakan oleh optimisnya penentuan target capaian tahun 2017 yang didasarkan atasi proyeksi yang dilakukan dengan asumsi membaik, namun PDRB Perkapita masih mengalami kontraksi negatif pada sejumlah sektor produk sebagai sumber pendapatan.

Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.13.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2017

Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU PDRB Perkapita pada tahun 2017 adalah:

- a. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia seperti pengembangan sentra industri kecil hasil pertanian dan kelautan.
- b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal.
- c. Meningkatkan pengelolaan sector perdagangan dan jasa.
- d. Meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencaker lokal.

14. PDRB Non Migas

Target IKU PDRB Non Migas sebesar Rp. 42,62 Triliun sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai realisasi sebesar Rp. 42,28 Triliun. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU PDRB Non Migas antara target dan realisasi sebesar 99,20%. Sejalan dengan capaian kinerja PDRB Non Migas diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2017.

Pada periode 2007–2011 secara umum peranan sektor Pertanian baik terhadap PDRB migas maupun nonmigas mengalami penurunan hampir di semua kabupaten/kota. Pada tahun 2007 PDRB Non Migas di kota Balikpapan mencapai 3,36% dan tahun 2011 mencapai 3,24%.

Pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 terhadap PDRB Non Migas mencapai 0,12% dan tahun 2011 mencapai 0,13%, capaian tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal rendahnya PDRB Non Migas pada sektor pertambangan dan penggalian dikarenakan arah kebijakan Kota Balikpapan tidak menetapkan kawasan tambang berdasarkan RTRW tahun 2012-2032 sehingga berdampak pada PDRB Non Migasnya paling kecil diantara kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

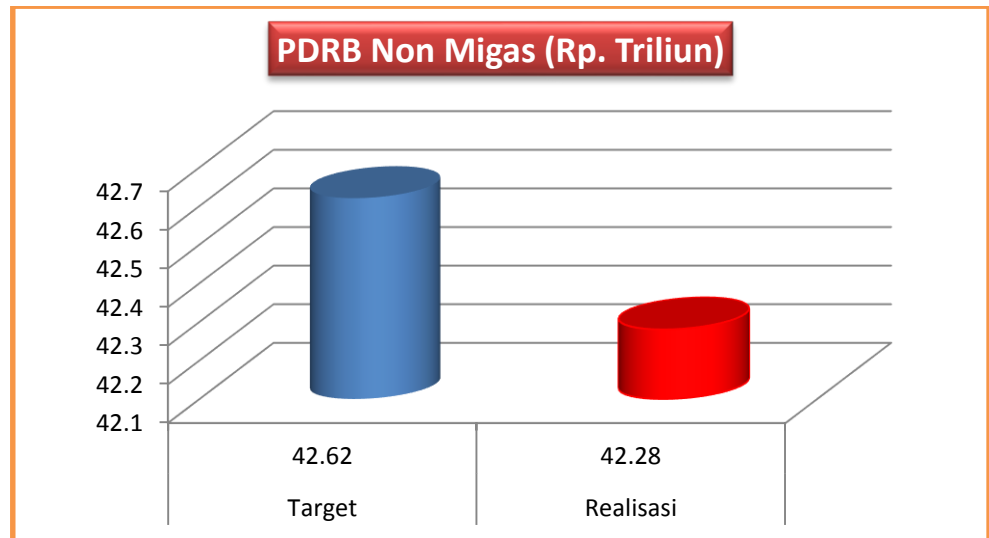
Ditinjau dari peran sektor industri pengolahan terhadap PDRB Non Migas capaian untuk tahun 2007 sebesar 2,88% dan tahun 2011 sebesar 2,41%. Capaian PDRB pada sektor industri pengolahan dari tahun 2007 dan 2011 tersebut sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan kota Balikpapan untu kawasana industrinya masih minim untuk industri pengolahan sehingga capaian pada sector tersebut terhadap PDRB Non Migas masih sangat rendah.

Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Non Migas capaian untuk tahun 2007 sebesar 38,30% dan tahun 2011 sebesar 31,16%. Capaian PDRB pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dari tahun 2007 dan 2011 tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya

di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan kota Balikpapan merupakan kota yang lebih memfokuskan pembangunan ekonomi melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran sehingga untuk capaian PDRB Non Migas sangat tinggi.

Peningkatan sector ekonomi lainnya yang tertinggi terjadi di Balikpapan, yaitu mencapai 6,53 persen (migas) dan 7,72 persen (nonmigas).

Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.14.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU PDRB Non Migas Tahun 2017

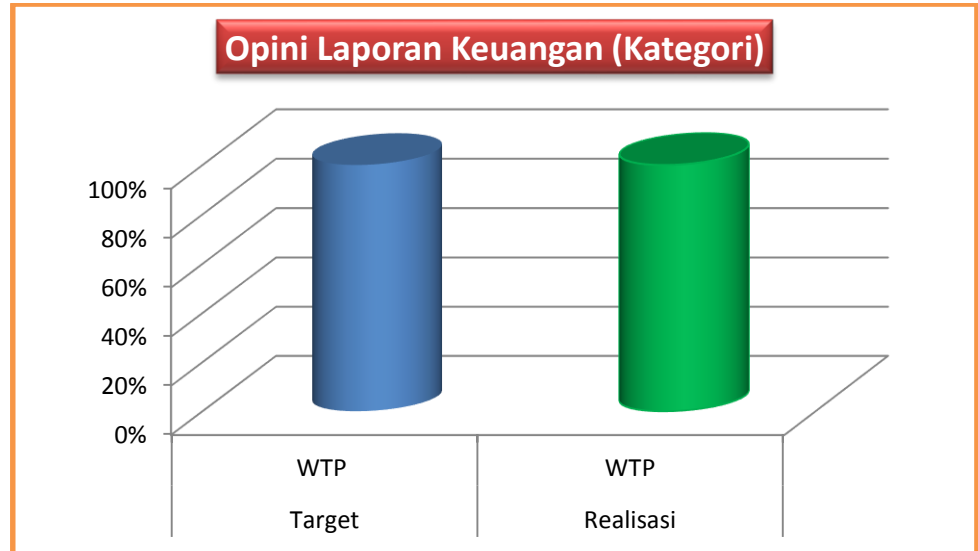
Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk peningkatan PDRB Non Migas antara lain :

- Meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah kota Balikpapan.
- Meningkatkan kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sector ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan yang terus dapat meningkat tiap tahunnya.
- Mempercepat pengembangan kawasan industri kariatangau dan melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di kota Balikpapan. Selain itu melakukan pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

15. Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU OLK adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian

kinerja IKU OLK antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU OLK diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



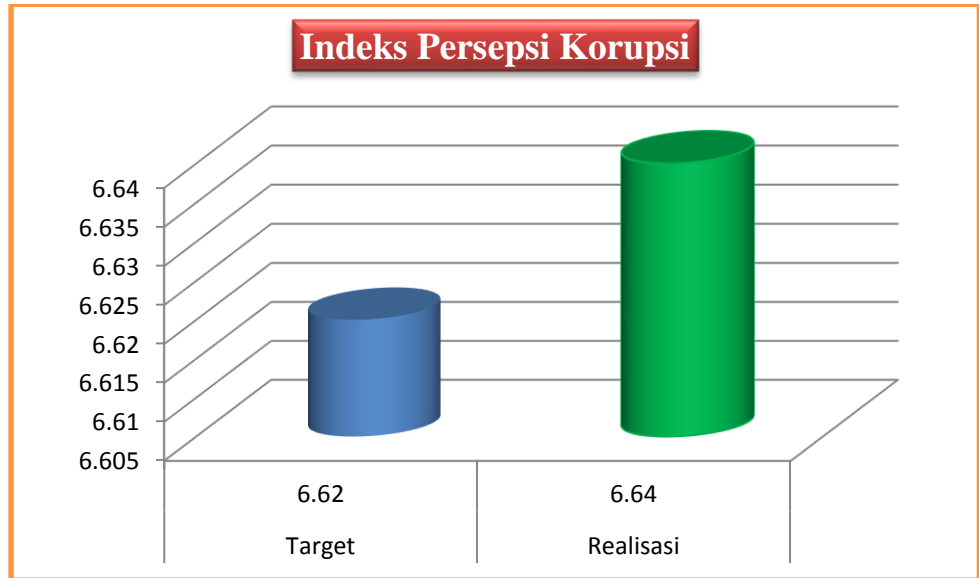
Gambar 3.15.

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2017

Tercapainya IKU OLK dengan Kategori WTP merupakan komitmen pemerintah kota dan instansi terkait dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, wajar, dan transparan sebagai dasar pengungkit Opini BPK dengan kategori WTP.

16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU IPK adalah 6,62 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai 6,64. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU IPK antara target dan realisasi sebesar 100,30%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU IPK diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.16.

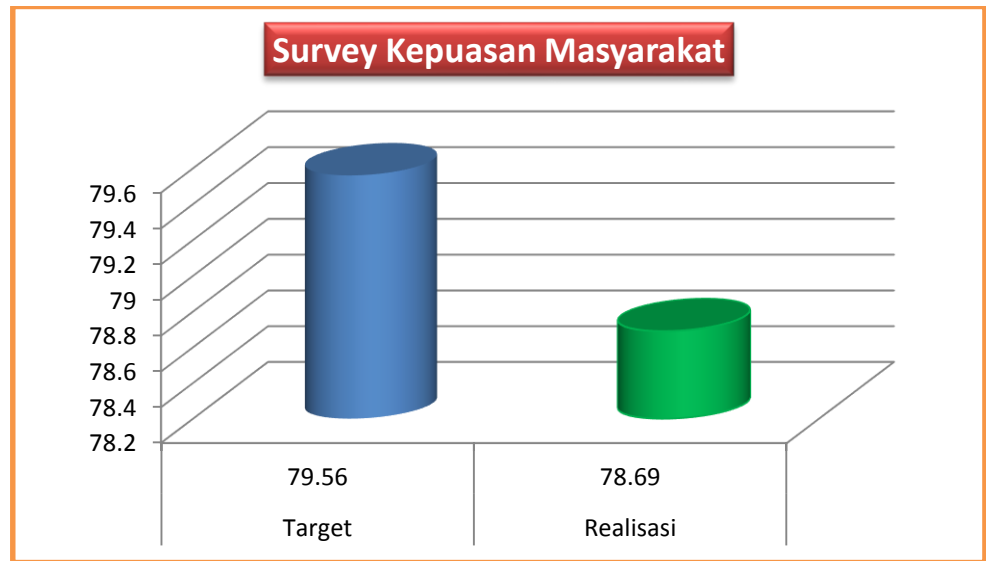
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017

Capaian IKU IPK sebesar 100,30% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2017, pemerintah kota Balikpapan telah membangun media aplikasi perencanaan pembangunan daerah atau yang lebih dikenal e-planning.
- b. Pada tahun yang sama dibangun pula aplikasi e-database untuk memberikan dukungan dalam merumuskan perencanaan pembangunan melalui data spasial.
- c. Pada tahun 2018, pemerintah kota Balikpapan, melaksanakan perencanaan menggunakan aplikasi e-planning dengan nama SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan).
- d. Pemerintah kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan kinerja tata kelola keuangan dari BPK selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2014-tahun 2016) kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

17. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU SKM adalah 79,56 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai 78,69. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU SKM antara target dan realisasi sebesar 98,91%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU SKM diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.17

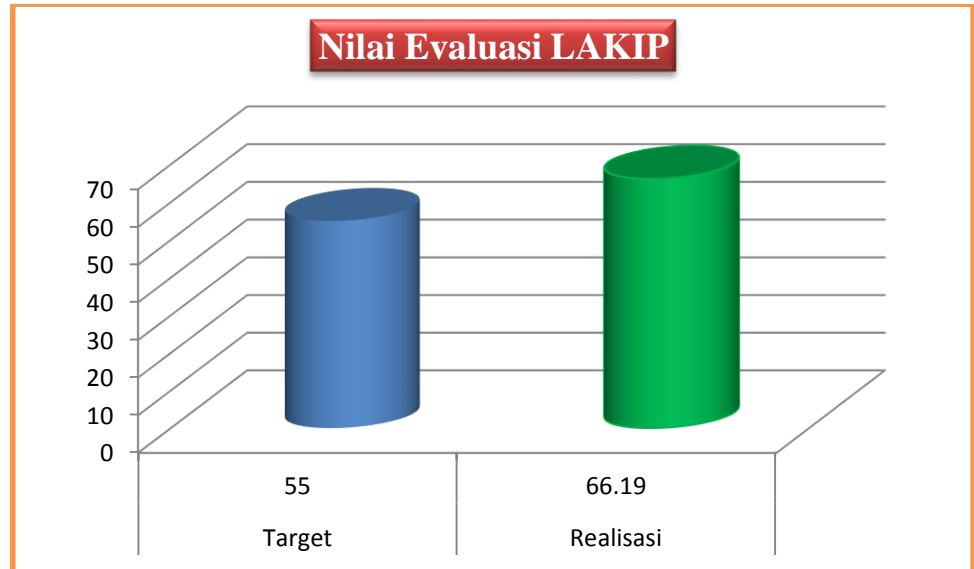
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

Permasalahan tidak tercapainya indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 dipengaruhi oleh rendahnya unsur pelayanan UPT Pasar Pandansari dengan nilai IKM 48,71 (mutu pelayanan “D” dengan kinerja tidak baik). Hal ini ditinjau dari ketersediaan sarana pengaduan, saran dan masukan, dan penataan tempat berjualan berdasarkan nilai rata-rata yang diberikan tiap responden sejumlah 2.100 untuk unsur pelayanan ketersediaan sarana pengaduan, saran dan masukan dan 2.220 unsur pelayanan penataan tempat berjualan.

Upaya tindak lanjut perbaikan terhadap tidak tercapainya IKM adalah meningkatkan unsur layanan pasar terutama dalam penyediaan sarana pengaduan, saran dan masukan, dan penataan tempat berjualan.

18. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Target IKU Evaluasi LAKIP adalah 55 dengan predikat CC sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai 66,19 dengan predikat B. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU SKM antara target dan realisasi sebesar 120,35%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Evaluasi LAKIP diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.18

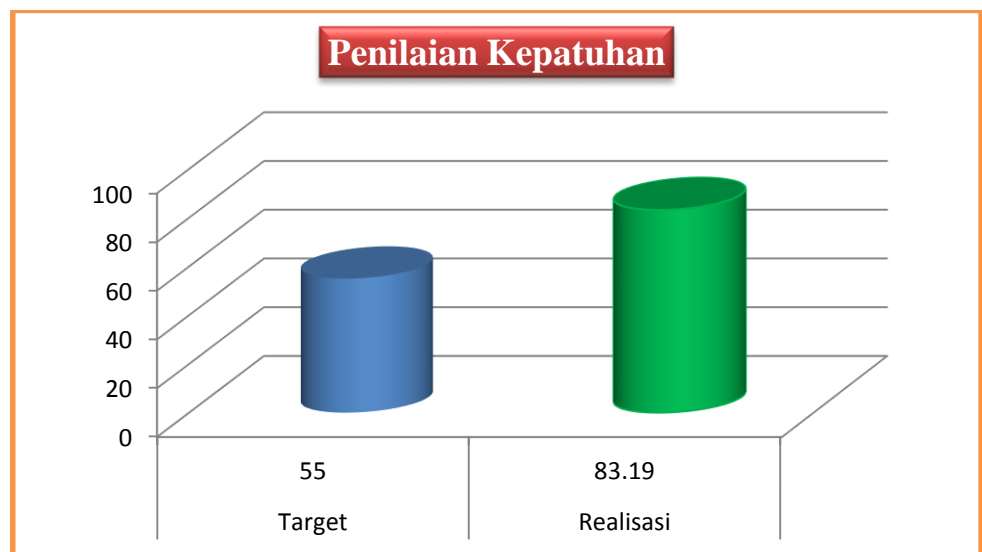
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2017

Capaian IKU IPK sebesar 120,35% menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja RPJMD periode 2016-2021.
- Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian Kinerja, untuk memastikan kualitas indikator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan memperhatikan kriteria indikator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan cukup.
- Melakukan penetapan kinerja dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV (sudah ditindaklanjuti dengan melakukan reuiu atas IKU kota pada tahun 2017).
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja yang sudah disepakati dan ditandatangani, serta pemantauan terhadap rencana aksi untuk mencapai PK tersebut (akan untuk RPJMD periode 2016-2021).
- Melaksanakan bimtek Aplikasi SILAKIP yang dibangun Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh perangkat daerah.
- Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

19. Penilaian Kepatuhan

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 55 (zona kuning) sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai 83,19 (zona hijau). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Penilaian Kepatuhan antara target dan realisasi sebesar 151,25%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Penilaian Kepatuhan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.19

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Penilaian Kepatuhan Tahun 2017

Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi), warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi pelayan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam kriteria zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut adalah:

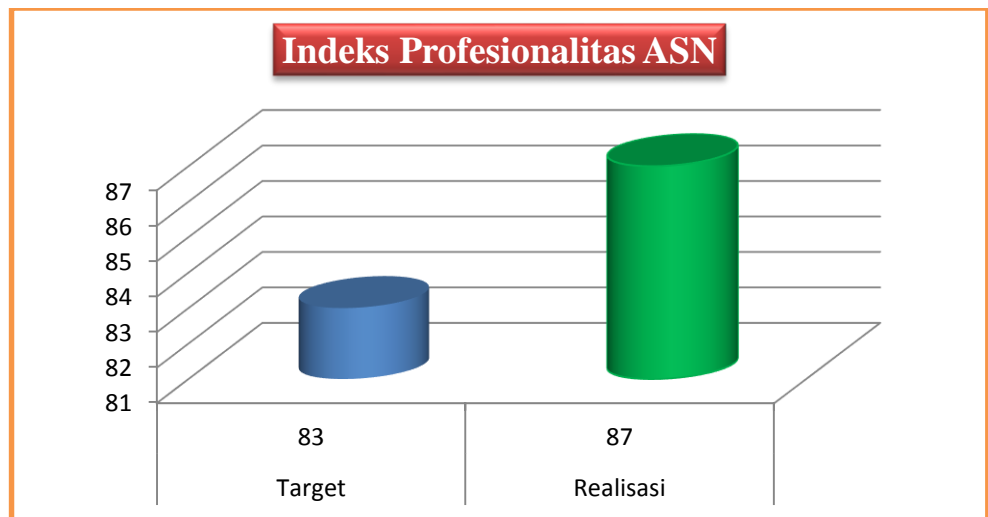
- Meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih

kurang dalam pelayanan serta adanya unsur gratifikasi dari layanan yang diberikan.

- c. Mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

20. Indeks Profesionalitas ASN

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 83 sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai 87 (data proyeksi). Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Penilaian Kepatuhan antara target dan realisasi sebesar 104,82%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Indeks Profesionalitas ASN diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2017. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.20

Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN yang diperoleh dari jumlah nilai SKP ditambah dengan selisih rata-rat gaji dan tunjangan kinerja dan jumlah pelanggaran disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan angka capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 87 menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kota Balikpapan memiliki predikat yang baik dalam melaksanakan dan mengemban tugas yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsinya pada tiap perangkat daerah. Sehubungan hal tersebut capaian kinerja indikator terhadap target sebesar 104,82 artinya kinerja atas indikator profesionalitas mengalami peningkatan dan melampaui dari target PK Wali Kota Balikpapan pada tahun 2017.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN adalah:

- a. Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
- b. Memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat.

3.2. Pengukuran Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Terhadap Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 dengan capaian realisasi IKU tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | REALISASI | |
|----|--|----------------|-----------|---------|
| | | | 2016 | 2017 |
| 1 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 10.54 | 10.55* |
| 2 | Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) | Tahun | 13.59 | 13.80* |
| 3 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 73.96 | 73.97* |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPTk) | Persen | 5.45 | 10.39* |
| 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 63.28 | 63.38* |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka Indeks | 78.57 | 78.91* |
| 7 | Tingkat Kemiskinan (TKm) | Persen | 2.81 | 2.82* |
| 8 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka Indeks | 90.11 | 91.45* |
| 9 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka Indeks | 62.45 | 61.25 |
| 10 | <i>Livable City Index</i> (LCI) | Angka Indeks | 0 | 80.81 |
| 11 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) | Angka Indeks | 0 | 78.10 |
| 12 | Indeks Gini Ratio (GR) | Angka Indeks | 0,28 | 0.31* |
| 13 | PDRB perkapita | Rp. (Juta) | 127.24 | 137.07* |
| 14 | PDRB non migas | Rp. (Triliun) | 46.06 | 42.28* |
| 15 | Opini laporan keuangan (OLK) | Kategori | WTP | WTP* |
| 16 | Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | Nilai Kriteria | 6.62 | 6.64 |
| 17 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Skor | 69.38 | 78.69 |
| 18 | Nilai Evaluasi LAKIP | Predikat | 60.85 | 66.19 |
| 19 | Penilaian Kepatuhan | Angka Indeks | 74.20 | 83.19 |
| 20 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | Angka Indeks | 83 | 87.73 |

Sumber : Hasil pengolahan data LKjIP, Bappeda Litbang 2017

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut, memberikan gambaran realisasi IKU tahun 2016 dan tahun 2017. Sehubungan dengan realisasi tersebut dapat dideskripsikan perbandingan capaian realisasi IKU sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Realisasi Indikator RLS pada tahun 2016 mencapai 10,54 tahun sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 10,55 tahun artinya capaian realisasi untuk IKU RLS mengalami peningkatan 0,01 tahun atau capaian realisasi meningkat 0,09%.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Realisasi Indikator AHLS pada tahun 2016 mencapai 13,59 tahun sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 13,80 tahun artinya capaian realisasi untuk IKU AHLS mengalami peningkatan 0,21 tahun atau capaian realisasi meningkat 1,52%.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Realisasi Indikator AHH pada tahun 2016 mencapai 73,96 tahun sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 73,97 tahun artinya capaian realisasi untuk IKU AHLS mengalami peningkatan 0,01 tahun atau capaian realisasi meningkat 0,01%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Realisasi Indikator TPT pada tahun 2016 mencapai 5,45 persen sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 10,39 persen artinya capaian realisasi untuk IKU TPTk mengalami peningkatan 4,94 persen atau capaian realisasi meningkat 47,55%.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Realisasi Indikator TPAK pada tahun 2016 mencapai 63,28 persen sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 63,38 persen artinya capaian realisasi untuk IKU TPAK mengalami peningkatan 0,1 persen atau capaian realisasi meningkat 0,16%.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Realisasi Indikator IPM pada tahun 2016 dengan angka indeks capaian 78,57 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka indeks capaian 78,91 artinya capaian realisasi untuk IKU IPM mengalami peningkatan angka indeks 0,34 atau capaian realisasi meningkat 0,43%.

7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Realisasi Indikator TKm pada tahun 2016 dengan capaian 2,81 persen sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan capaian 2,82 persen artinya

capaian realisasi untuk IKU TKm mengalami peningkatan angka indeks 0,01 atau capaian realisasi meningkat 0,35%.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Realisasi Indikator IPG pada tahun 2016 dengan angka indeks capaian 90,11 persen sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka indeks capaian 91,45 persen artinya capaian realisasi untuk IKU IPG mengalami peningkatan angka indeks 1,34 atau capaian realisasi meningkat 1,47%.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Realisasi Indikator IKLH pada tahun 2016 dengan angka indeks capaian 62,45 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka indeks capaian 61,25 artinya capaian realisasi untuk IKU IKLH mengalami Penurunan (-) angka indeks 1,20 atau capaian realisasi menurun (-) 1,96%.

10. *Livable City Index* (LCI)

Tidak terdapat data realisasi Indikator LCI pada tahun 2016 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka indeks capaian 80,81. artinya bahwa berdasarkan survey *Most Livable City Index* oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Kota Balikpapan adalah kota yang konsisten menjadi kota yang layak huni bagi warganya. Pada aspek keamanan kota, Balikpapan menempati posisi kedua sebagai kota aman dengan skor 70. Selain ditinjau dari aspek keamanan Kota Balikpapan merupakan kota dengan indeks kebersihan kota paling tinggi dengan skor 69. Pengukuran LCI didasarkan atas Margin of error 95% tingkat kepercayaannya. Metode penelitian dilakukan dengan metode kuisioner menggunakan skala likert. Dalam kuisioner itu berisi pertanyaan yang mewakili 29 kriteria mewakili tingkat kepuasan warga untuk menghuni sebuah kota.

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)

Tidak terdapat data realisasi Indikator IKLI pada tahun 2016 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar capaian 78,10 Angka capaian tersebut jika dimasukkan dalam skala 1-10 untuk pembangunan layanan infrastruktur Kalimantan Timur maka Nilai Skala untuk Indikator IKLI pada tahun 2017 mencapai 8,8 artinya pembangunan kepuasan layanan infrastruktur di kota Balikpapan telah dapat diandalkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat kota yang menerima langsung layanan infrastruktur dasar.

12. Indeks Gini Ratio (GR)

Tidak terdapat data realisasi Indikator pada tahun 2016, namun pada tahun 2014 angka indeks Gini Ratio Kota Balikpapan mencapai 0,33 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka indeks capaian 0,31. Capaian IKU 2017 memberikan sinyal yang positif terhadap menurunnya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kota Balikpapan. Selama 3 tahun terakhir ketimpangan

pengeluaran turun (-) 0,02 poin atau (-) 6,45%., dengan turunnya ketimpangan pengeluaran menunjukkan adanya pemerataan kesejahteraan di Kota Balikpapan.

13. PDRB perkapita

Realisasi Indikator PDRB Perkapita pada tahun 2016 dengan capaian Rp. 127,24 juta sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan capaian Rp. 137,07 juta artinya capaian realisasi untuk IKU PDRB Perkapita mengalami peningkatan Rp. 9,83 juta atau capaian realisasi meningkat 7,17%. Peningkatan PDRB Perkapita sebesar Rp. 9,83 juta menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian di Kota Balikpapan dari tahun 2016, dimana hal ini didukung oleh mengeliatnya kembali usaha pertambangan dan perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha pada bidang tambang di Kalimantan Timur sehingga membawa dampak pada perekonomian Kota Balikpapan.

14. PDRB Non Migas

Realisasi Indikator PDRB non migas pada tahun 2016 dengan capaian Rp. 46,06 Triliun sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan capaian Rp. 42,28 Triliun artinya capaian realisasi untuk IKU PDRB non migas mengalami penurunan (-) Rp. 3,78 Triliun atau (-) 8,94%.

15. Opini laporan keuangan (OLK)

Realisasi Indikator **Opini laporan keuangan** pada tahun 2016 dengan capaian WTP sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan capaian WTP artinya hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Realisasi Indikator IPK pada tahun 2016 dengan angka indeks capaian 6,62 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka indeks capaian 6,64 artinya capaian realisasi untuk IKU IPK mengalami peningkatan 0,02 atau 0,30%. Capaian pada angka indeks 6,64 tersebut memberikan persepsi korupsi pada skala sedang atau dapat dikatakan adanya arah persepsi publik terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang menolak KKN dimana rentang skala penilaian didasarkan atas skala 0 – 10, dimana jika IPK sama dengan 0 berarti sangat korup dan sebaliknya.

17. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Realisasi Indikator SKM pada tahun 2016 dengan angka kepuasan masyarakat sebesar 69,38 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka kepuasan masyarakat sebesar 78,69 artinya capaian realisasi untuk IKU SKM mengalami peningkatan 9,31 atau 11,83%. Capaian pada angka kepuasan masyarakat tersebut memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Balikpapan

menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan layanan ditiap lini urusan pemerintah guna mewujudkan perangkat daerah yang professional dalam memberikan layanan bagi masyarakat, stakeholder dan setiap penduduk yang tinggal di Kota Balikpapan.

18. Nilai Evaluasi LAKIP

Realisasi Indikator Nilai Evaluasi LAKIP pada tahun 2016 dengan angka capaian 60,85 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka capaian 66,19 artinya capaian realisasi untuk IKU Nilai Evaluasi LAKIP mengalami peningkatan 5,34 atau 8,07%.

Capaian Indikator Nilai Evaluasi LAKIP tersebut memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Balikpapan secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan sistem manajemen kinerja, sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu berupaya melakukan penyempurnaan sasaran dan Indikator Kinerja Utama, kepada seluruh SKPD sampai dengan indikator kinerja di level Eselon III dan IV, sehingga tercipta keselarasan penjabaran (cascade down).

19. Penilaian Kepatuhan

Realisasi Indikator Penilaian Kepatuhan pada tahun 2016 dengan angka capaian 74,20 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka capaian 83,19 artinya capaian realisasi untuk IKU Penilaian Kepatuhan mengalami peningkatan 8,99 atau 10,81%.

Capaian Indikator Penilaian Kepatuhan tersebut memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Balikpapan bersama perangkat daerah telah melaksanakan kepatuhan dalam berbagai tugas dan layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan capaian penilaian Ombudsmen RI, Nilai Kepatuhan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan berada pada Zonasi Pewarnaan Hijau, hal ini menyatakan bahwa secara rata-rata layanan yang diberikan bagi masyarakat telah mengikuti SOP layanan dan rendahnya pengaruh negatif (suap suap dalam proses layanan, gratifikasi, unsur nepotisme dsb) atas kepentingan aparatur dalam memberikan layanan.

20. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2016 dengan angka capaian 83 sedangkan capaian sampai dengan akhir tahun 2017 dengan angka capaian 87,73 artinya capaian realisasi untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan 4,73 atau 5,39%.

Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN tersebut memberikan gambaran bahwa individu ASN yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan secara rata-rata telah memiliki tingkat profesionalitas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada perangkatnya masing-masing. Hal ini pula dapat diartikan bahwa ASN Kota Balikpapan telah mampu dan mandiri melaksanakan pekerjaannya melalui program kegiatan yang didasarkan atas perencanaan pada setiap organisasi perangkat daerah.

3.3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2017 terhadap Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Nasional, Provinsi dan Kota Kalimantan Timur

Berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2017 dan Tahun 2016 pada 20 indikator yang diperjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada sub bab ini capaian dari Indikator Kinerja Utama tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja utama nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan 2 (dua) Kota di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda dan Kota Bontang terkait dengan 20 Indikator yang diperjanjikan. Adapun perbandingan capaian menurut indikator sebagai berikut.

1. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator RLS Kota Balikpapan mencapai 10,54 tahun sedangkan capaian Nasional sebesar 7,95 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator RLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 1,32.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 10,55 tahun sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk RLS Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator RLS Kota Balikpapan mencapai 10,54 tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim sebesar 9,15 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator RLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kaltim. Nilai Rasio perbandingan Indikator RLS mencapai 1,15.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator RLS Kota Balikpapan mencapai 10,55 tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS didaerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk RLS Provinsi Kaltim.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator RLS Kota Balikpapan mencapai 10,54 tahun sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 10,33 tahun dan Kota Bontang sebesar 10,39 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator RLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator RLS Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda mencapai 1,02, dan Kota Balikpapan dengan Kota Bontang mencapai 1,01.

f. Perbandingan Realisasi capaian IKU RLS Kota Balikpapan dengan RLS Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator RLS Kota Balikpapan mencapai 10,55 tahun sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS didaerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian RLS Tahun 2017.

2. Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHLS Kota Balikpapan dengan HLS Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator AHLS Kota Balikpapan mencapai 13,59 tahun sedangkan capaian Nasional sebesar 12,72 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator HLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 1,07.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHLS Kota Balikpapan dengan AHLS Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 13,80 tahun sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk HLS Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHLS Kota Balikpapan dengan AHLS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian AHLS Kota Balikpapan mencapai 13,59 tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim

sebesar 13,35 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator AHLS di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kaltim. Nilai Rasio perbandingan Indikator AHLS mencapai 1,02.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHLS Kota Balikpapan dengan AHLS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator AHLS Kota Balikpapan mencapai 13,80 tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS didaerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk AHLS Provinsi Kaltim.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHLS Kota Balikpapan dengan AHLS Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator AHLS Kota Balikpapan mencapai 13,59 tahun sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 14,23 tahun dan Kota Bontang sebesar 12,79 tahun. Artinya realisasi Indikator HLS di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Kota Samarinda dan lebih tinggi dari realisasi capaian Kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator AHLS Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda mencapai 0,96, dan Kota Balikpapan dengan Kota Bontang mencapai 1,06.

f. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHLS Kota Balikpapan dengan AHLS Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator AHLS Kota Balikpapan mencapai 13,80 tahun sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS didaerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian AHLS Tahun 2017.

3. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator AHH Kota Balikpapan mencapai 73,96 tahun sedangkan capaian Nasional sebesar 70,90 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator AHH di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 1,04.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mencapai 73,97 tahun sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat

maupun BPS daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk AHH Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator AHH Kota Balikpapan mencapai 73,96 tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim sebesar 73,65 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator AHH di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kaltim. Nilai Rasio perbandingan Indikator AHH mencapai 1,004.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator AHH Kota Balikpapan mencapai 73,97 tahun sedangkan capaian Provinsi Kaltim belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk AHH Provinsi Kaltim.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator AHH Kota Balikpapan mencapai 73,96 tahun sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 73,68 tahun dan Kota Bontang sebesar 73,71 tahun. Artinya realisasi capaian Indikator AHH di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator AHH Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda mencapai 1,004, dan Kota Balikpapan dengan Kota Bontang mencapai 1,003.

f. Perbandingan Realisasi capaian IKU AHH Kota Balikpapan dengan AHH Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator AHH Kota Balikpapan mencapai 73,97 tahun sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian AHH Tahun 2017.

4. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 5,45 persen sedangkan capaian Nasional sebesar 5,50 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 0,99.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 10,39 persen sedangkan capaian Nasional sebesar 5,50 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPT mencapai 1,89.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 5,45 persen sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,50 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPT mencapai 0,73.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 10,39 persen sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,91 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPT mencapai 1,50.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 5,45 persen sedangkan capaian Kota Samarinda belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda yang merilis atau mempublikasikan capaian TPT Tahun 2016. TPT Kota Bontang sebesar 7,95 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TPT di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPT Kota Balikpapan dengan Kota Balikpapan dengan Kota Bontang mencapai 0,69.

f. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPT Kota Balikpapan dengan TPT Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TPT Kota Balikpapan mencapai 10,39 persen sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian TPT Tahun 2017.

5. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPTK)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan mencapai 63,28 persen sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk TPTK Nasional.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan mencapai 63,38 persen sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk TPTK Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan mencapai 63,28 persen sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 62,40 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TPTK di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator TPTK mencapai 1,01.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan mencapai 63,38 persen sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk TPTK Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU TPTK Kota Balikpapan dengan TPTK Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi untuk capaian Indikator TPTK Kota Balikpapan pada tahun 2016 mencapai 63,38 persen dan capaian Indikator TPTK tahun 2007 sebesar 63,28 persen, sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk TPTK.

6. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 78,57 sedangkan capaian Nasional sebesar 70,18. Artinya realisasi capaian Indikator IPM di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator Rata-rata Lama Sekolah mencapai 1,12.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 78,91 sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPM Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 78,57 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 74,17. Artinya realisasi capaian Indikator IPM di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator IPM mencapai 1,06.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 78,91 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPM Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 78,57 sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 78,91 dan Kota Bontang sebesar 78,92. Artinya realisasi capaian Indikator IPM di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang. Nilai Rasio perbandingan Indikator IPM Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda mencapai 0,996, dan Kota Balikpapan dengan Kota Bontang mencapai 0,996.

f. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPM Kota Balikpapan dengan IPM Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPM Kota Balikpapan mencapai 78,91 sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian IPM Tahun 2017.

7. Indikator Tingkat Kemiskinan (TKm)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TKm Kota Balikpapan mencapai 2,81 persen sedangkan capaian Nasional sebesar 10,86 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TKm di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TKm mencapai 0,26.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TKm Kota Balikpapan mencapai 2,82 persen sedangkan capaian Nasional sebesar 10,12 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TKm di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator TKm mencapai 0,28.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator TKm Kota Balikpapan mencapai 2,81 persen sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,23 persen. Artinya realisasi capaian Indikator TKm di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator TKm mencapai 0,45.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator TKm Kota Balikpapan mencapai 2,82 persen sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk TKm Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU TKm Kota Balikpapan dengan TKm Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator TKm Kota Balikpapan pada tahun 2016 mencapai 63,38 persen dan capaian Indikator TKm tahun 2017 sebesar 63,28 persen, sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk TKm.

8. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPG Kota Balikpapan mencapai 90,11 sedangkan capaian Nasional sebesar 92,74 persen. Artinya realisasi capaian Indikator IPG di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator IPG mencapai 0,97.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPG Kota Balikpapan mencapai 91,45 sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPG Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPG Kota Balikpapan mencapai 90,11 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPG Provinsi Kalimantan Timur.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPG Kota Balikpapan mencapai 91,45 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPG Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU IPG Kota Balikpapan dengan IPG Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator IPG Kota Balikpapan pada tahun 2016 mencapai 90,11 dan capaian Indikator IPG tahun 2017 sebesar 91,45, sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IPG.

9. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IKLH Kota Balikpapan mencapai 62,45 sedangkan capaian Nasional sebesar 65,73 persen. Artinya realisasi capaian Indikator IKLH di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator IKLH mencapai 0,95.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IKLH Kota Balikpapan mencapai 61,25 sedangkan capaian Nasional belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat dan daerah serta Kementerian Lingkungan Hidup merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLH Nasional.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IKLH Kota Balikpapan mencapai 62,45 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,85. Artinya realisasi capaian Indikator IKLH di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator IKLH mencapai 0,81.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IKLH Kota Balikpapan mencapai 91,45 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat dan daerah serta BLH Provinsi Kaltim merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLH Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU IKLH Kota Balikpapan dengan IKLH Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator IKLH Kota Balikpapan pada tahun 2016 mencapai 90,11 dan capaian Indikator IKLH tahun 2017 sebesar 91,45, sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLH.

10. Indikator *Livable City Index* (LCI)

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator LCI Kota Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 80,81, sedangkan capaian Kota Samarinda sebesar 56,90. Artinya realisasi capaian Indikator LCI di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Kota Samarinda. Nilai Rasio perbandingan Indikator LCI Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda mencapai 1,42.

11. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator IKLI Kota Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 78,10, sedangkan capaian untuk Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLI.

12. Indikator Indeks Gini Ratio (GR)

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU GR Kota Balikpapan dengan GR Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator GR Kota Balikpapan mencapai 0,31 sedangkan capaian Nasional sebesar 0,39 (data Maret-September 2017, BPS). Artinya realisasi capaian Indikator GR di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator GR mencapai 0,79.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU GR Kota Balikpapan dengan GR Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator GR Kota Balikpapan mencapai 0,31 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur untuk GR sebesar 0,34. Artinya realisasi capaian Indikator GR di Kota

Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator GR mencapai 0,91.

c. Perbandingan Realisasi capaian IKU GR Kota Balikpapan dengan GR Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator GR Kota Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 0,31, sedangkan capaian Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk GR.

13. Indikator PDRB perkapita

a. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB perkapita Nasional Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator PDRB perkapita Kota Balikpapan mencapai 127,24 Juta sedangkan capaian Nasional sebesar 47,96 Juta. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Perkapita di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Perkapita mencapai 0,06.

b. Perbandingan Realisasi capaian PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Nasional Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator PDRB Perkapita Kota Balikpapan mencapai 137,07 Juta sedangkan capaian Nasional sebesar 51,89 Juta. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Perkapita di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Nasional. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Perkapita mencapai 2,64.

c. Perbandingan Realisasi capaian PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator PDRB Perkapita Kota Balikpapan mencapai 127,24 Juta sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 50,27 Juta. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Perkapita di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Perkapita mencapai 0,06.

d. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator PDRB Perkapita Kota Balikpapan mencapai 137,07 Juta sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur belum terdapat data atau sumber terpercaya dalam hal ini BPS Pusat dan daerah merilis atau mempublikasikan capaian untuk PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Timur.

e. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Perkapita Kota Balikpapan dengan PDRB Perkapita Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator PDRB Perkapita Kota Balikpapan pada tahun 2016 mencapai 127,24 Juta dan capaian Indikator PDRB Perkapita tahun 2017 sebesar 137,07 Juta, sedangkan capaian Indikator PDRB Perkapita tahun 2016 Kota Samarinda mencapai 63,10 Juta dan Kota Bontang mencapai 323,22 Juta. Adapun rasio perbandingan indikator PDRB Perkapita antara Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda sebesar 0,04 dan dengan Kota Bontang sebesar 0,01. Sedangkan indikator PDRB Perkapita tahun 2017 belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk PDRB Perkapita.

14. Indikator PDRB Non Migas

a. Perbandingan Realisasi capaian PDRB Non Migas Kota Balikpapan dengan PDRB Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator PDRB Non Migas Kota Balikpapan mencapai 46,06 Triliun sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 507,07 Triliun. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Non Migas di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Non Migas mencapai 0,006.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU PDRB Non Migas Kota Balikpapan dengan PDRB Non Migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator PDRB Non Migas Kota Balikpapan mencapai 42,28 Triliun sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 483,88 Triliun. Artinya realisasi capaian Indikator PDRB Non Migas di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator PDRB Non Migas mencapai 0,096.

15. Indikator Opini Laporan Keuangan (OLK)

a. Perbandingan Realisasi capaian OLK Kota Balikpapan dengan OLK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator OLK Kota Balikpapan memperoleh predikat WTP sedangkan capaian OLK Provinsi Kalimantan Timur adalah WTP. Sedangkan untuk realisasi OLK tahun 2017 akan di peroleh pada akhir bulan maret tahun 2017.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU OLK Kota Balikpapan dengan OLK Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator OLK Kota Balikpapan pada tahun 2016 adalah WTP, dan hal yang sama pada tahun 2016 Kota Samarinda dan Kota Bontang memperoleh OLK dengan kategori WTP dari BPK RI. Rasio perbandingan terhadap realisasi IKU OLK adalah 1,00.

16. Indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

a. Perbandingan Realisasi capaian IPK Kota Balikpapan dengan IPK Nasional Tahun 2017.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017, untuk capaian Indikator IPK Kota Balikpapan dengan skala capaian (1-10) sebesar 6,64 meningkat dari tahun 2015 dengan (Skala 1-100) angka IPK sebesar 57. Capaian tersebut memiliki arti bahwa IPK Kota Balikpapan dalam zona warna hijau muda dengan predikat persepsi cenderung bersih sedangkan capaian Nasional adalah 37 menggunakan skala angka persepsi (1-100). Capaian IPK Indonesia masuk dalam zona warna merah muda dengan predikat persepsi cenderung kearah korupsi dan pencegahan korupis melambat.

b. Perbandingan Realisasi capaian IPK Kota Balikpapan dengan IPK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPK Kota Balikpapan mencapai 6,62 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,58. Artinya realisasi capaian Indikator IPK di Kota Balikpapan lebih tinggi dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator IPK mencapai 0,50.

17. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

a. Perbandingan Realisasi capaian SKM Kota Balikpapan dengan SKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator SKM Kota Balikpapan mencapai 69,38 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,00. Artinya realisasi capaian Indikator SKM di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator SKM mencapai 0,04.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU SKM Kota Balikpapan dengan SKM Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator SKM Kota Balikpapan pada tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini Bagian Ortal

Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk SKM.

18. Indikator Nilai Evaluasi Lakip

a. Perbandingan Realisasi capaian Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan dengan Nilai Evaluasi Lakip Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan mencapai 60,85 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 77,37. Artinya realisasi capaian Indikator Nilai Evaluasi Lakip di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator Nilai Evaluasi Lakip mencapai 0,04.

b. Perbandingan Realisasi capaian IKU Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan dengan Nilai Evaluasi Lakip Kota Samarinda dan Kota Bontang Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Perbandingan capaian realisasi capaian untuk Indikator Nilai Evaluasi Lakip Kota Balikpapan pada tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini Bagian Organisasi Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk Nilai Evaluasi Lakip.

19. Indikator Penilaian Kepatuhan

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator Penilaian Kepatuhan Kota Balikpapan mencapai 74,20 (zona kuning) sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 95,47 (zona hijau). Artinya realisasi capaian Indikator Penilaian Kepatuhan di Kota Balikpapan lebih rendah dari realisasi capaian Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Rasio perbandingan Indikator Penilaian Kepatuhan mencapai 0,03. Untuk perbandingan capaian realisasi pada tahun 2017 Indikator Penilaian Kepatuhan Kota Balikpapan mencapai 83,19 berdasarkan hasil penilaian Ombudsmen RI (ORI)

20. Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Perbandingan capaian realisasi pada tahun 2016, untuk capaian Indikator IPASN Kota Balikpapan mencapai 83 dan tahun 2017 mencapai sedangkan capaian sedangkan capaian untuk Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang belum terdapat data atau sumber data terpercaya dalam hal ini BPS Pusat maupun BPS di daerah Kota Samarinda dan Kota Bontang merilis atau mempublikasikan capaian untuk IKLI.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang diukur atas realisasi terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2017. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sekaligus pencapaian target kinerja yang ada dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2017 (setelah perubahan), maka realisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2017

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Pendapatan Daerah | 1.938.309.743.312,00 | 1.808.970.163.703,09 | 93,33% |
| Belanja | 2.022.018.424.820,00 | 1.696.044.236.004,85 | 83,88% |
| Pembiayaan Penerimaan | 102.568.681.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pembiayaan Pengeluaran | 18.860.000.000,00 | 17.560.935.578,00 | 93,11% |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Secara umum, realisasi APBD Kota Balikpapan Tahun 2017, baik komponen pendapatan, komponen belanja, komponen pembiayaan penerimaan dan komponen pembiayaan pengeluaran cukup bagus, yaitu berkisar antara 83,88 % sampai dengan 100%. Jika dilihat per komponen APBD, pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2016, yaitu sekitar 13,27 % atau sebesar Rp 296.441.153.984,00.

Adapun rincian pendapatan daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 setelah perubahan (sebelum dilakukan audit oleh BPKRI) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Rincian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Anggaran Pendapatan (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | % |
| 1 | PAD | 568.575.283.786,00 | 612.300.113.260,09 | 107,69% |
| 2 | Dana Perimbangan | 922.960.601.526,00 | 817.394.319.468,00 | 88,56% |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 446.773.858.000,00 | 379.275.730.975,00 | 84,89% |
| | JUMLAH | 1.938.309.743.312,00 | 1.808.970.163.703,09 | 93,33% |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel pendapatan di atas, jika dilihat pada komponen pendapatan, dana perimbangan tahun 2017 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 yaitu sekitar 27,06 %, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sekitar 8,07 %.

Dengan demikian, jika dilihat secara keseluruhan, maka pendapatan tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 13,27 %.

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan
Tahun 2016-2021

| Tahun | Target PAD | Realisasi PAD | Pendapatan |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2012 | 290.007.283.203,00 | 352.034.256.557,17 | 1.647.132.469.666,19 |
| 2013 | 354.840.272.692,00 | 470.465.949.932,97 | 2.214.991.437.841,00 |
| 2014 | 638.630.681.123,00 | 729.037.647.063,32 | 2.474.995.562.245,32 |
| 2015 | 539.892.356.090,00 | 582.744.865.141,84 | 2.529.001.945.784,00 |
| 2016 | 555.970.991.413,00 | 560.364.263.457,29 | 1.993.392.160.506,29 |
| 2017 | 568.575.283.786,00 | 612.300.113.260,09 | 1.808.970.163.703,09 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Pendapatan asli daerah tahun 2016 tidak mengalami penurunan, bahkan relatif naik sebesar 9,27%, namun pendapatan secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 karena dipengaruhi oleh turunnya dana perimbangan.

Realisasi perkembangan dana perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Tahun 2016-2021

| Tahun | Perimbangan | Pendapatan | Proporsi Terhadap Pendapatan |
|-------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 2012 | 1.074.521.018.050,00 | 1.647.132.469.666,19 | 134,0% |
| 2013 | 1.173.881.648.321,00 | 2.214.991.437.841,00 | 109,3% |
| 2014 | 2.635.068.224.864,00 | 2,474,995,562,245,32 | 106,47% |
| 2015 | 1.430.910.142.069,00 | 2.233.750.843.885,84 | 88,33% |
| 2016 | 1.066.561.649.134,00 | 1.993.392.160.506,29 | 53,51% |
| 2017 | 922.960.601.526,00 | 1.808.970.163.703,09 | 51,02% |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Berikut adalah target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Belanja Tidak Langsung | 703.701.722.888,00 | 644.341.492.853,75 | 91,56 |
| Belanja Langsung | 1,318,316,701,932,00 | 1.051.702.743.151,10 | 79,78 |
| TOTAL | 2.022.018.424.820,00 | 1.696.044.236.004,85 | 83,88 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Realisasi perkembangan Belanja Kota Balikpapan selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perkembangan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

| Tahun | Belanja Tidak Langsung | (%) | Belanja Langsung | (%) |
|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|
| 2012 | 636.400.738.757,38 | 95.4 | 1.035.447.137.559,59 | 89.5 |
| 2013 | 734.517.519.834,65 | 88.4 | 1.686.329.924.246,29 | 72.2 |
| 2014 | 783.390.898.940,53 | 91.6 | 1.716.199.878.941,62 | 74.1 |
| 2015 | 990.651.523.663,37 | 91.89 | 1.916.938.797.113,18 | 81.45 |
| 2016 | 852.431.100.615,53 | 92,05 | 1.263.300.175.173,30 | 82,38 |
| 2017 | 703,701,722,888.00 | 91,56 | 1,318,316,701,932.00 | 79,78 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Jika dilihat pada tabel di atas, maka komponen belanja langsung tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016. Hal ini cukup berpengaruh terhadap capaian target kinerja tahun 2017 yang sudah dijelaskan pada sub bab capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan di atas.

Terkait dengan capaian Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Wali Kota Balikpapan tidak terlepas dari dukungan sumber anggaran yang dialokasikan untuk belanja pada tiap program yang berkorelasi dengan 20 IKU Kota Balikpapan sebagaimana termuat menjadi satu kesatuan pada Perjanjian Kinerja. Adapun alokasi dan realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | Realisasi |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Misi Ke-1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing Tinggi | 44,836,825,233.00 | 77,704,908,260.95 |
| 1 | Program pendidikan non formal | 6,771,120,000.00 | 9,010,796,946.00 |
| 2 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 1,025,233,500.00 | 867,936,198.00 |
| 3 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 4,766,610,000.00 | 4,513,816,630.00 |
| 4 | Program Pendidikan Dasar | 5,219,000,000.00 | 11,560,133,732.00 |
| 5 | Program Pendidikan Menengah | 1,588,321,233.00 | 1,588,321,232.30 |
| 6 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 272,475,000.00 | 436,540,522.00 |
| 7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | - | 32,980,561,204.57 |
| 8 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak | - | 4,450,439,102.00 |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | Realisasi |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 9 | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | - | 1,048,895,864.00 |
| 10 | Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan | 13,116,255,000.00 | 2,380,340,847.08 |
| 11 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 903,697,500.00 | 617,035,600.00 |
| 12 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 325,255,000.00 | 325,255,012.00 |
| 13 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 143,307,000.00 | 90,266,000.00 |
| 14 | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | 4,352,965,000.00 | 518,906,000.00 |
| 15 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 1,733,144,000.00 | 2,487,637,102.00 |
| 16 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 536,384,500.00 | 965,867,200.00 |
| 17 | Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan | - | 498,452,000.00 |
| 18 | Program Keluarga Berencana | 1,877,361,000.00 | 836,848,950.00 |
| 19 | Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 1,032,253,000.00 | 1,505,049,020.00 |
| 20 | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) | 214,097,500.00 | 133,618,250.00 |
| 21 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | 461,948,000.00 | 308,486,849.00 |
| 22 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 497,398,000.00 | 579,704,000.00 |
| Misi Ke-2 | Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan | 126,706,848,335.00 | 109,056,712,877.00 |
| 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | 912,090,000.00 | 847,561,250.00 |
| 2 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 126,910,000.00 | 53,024,250.00 |
| 3 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 1,309,465,000.00 | 1,273,375,130.00 |
| 4 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2,125,000,000.00 | 811,592,380.00 |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 125,000,000.00 | 123,219,700.00 |
| 6 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 42,964,625,000.00 | 44,297,582,892.00 |
| 7 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 6,885,096,935.00 | 4,109,558,838.00 |
| 8 | Program Pengembangan Perumahan | 3,089,436,000.00 | 1,596,815,385.00 |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | Realisasi |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 9 | Program penyediaan dan pengolahan air baku | 41,396,143,000.00 | 23,299,775,520.00 |
| 10 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 2,791,000,000.00 | 2,063,019,357.00 |
| 11 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran | 230,109,000.00 | 230,109,011.00 |
| 12 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | | 15,088,905,000.00 |
| 13 | Program Sarana dan Prasarana Logistik | 3,843,814,400.00 | 6,201,156,250.00 |
| 14 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 100,000,000.00 | - |
| 15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 30,000,000.00 | 16,560,000.00 |
| 16 | Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 1,784,990,000.00 | 1,068,308,100.00 |
| 17 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 452,650,000.00 | 376,072,500.00 |
| 18 | Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika | - | - |
| 19 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 1,273,080,000.00 | 1,416,484,600.00 |
| 20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 140,500,000.00 | 124,927,600.00 |
| 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 16,049,270,000.00 | 932,780,080.00 |
| 22 | Program Pengelolaan Keaneka ragaman Budaya | | 826,962,800.00 |
| 23 | Program Pelestarian Cagar Budaya | 396,500,000.00 | 787,169,364.00 |
| 24 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan | 681,169,000.00 | 494,915,870.00 |
| 25 | Program Penelitian dan Pengembangan | - | 3,016,837,000.00 |
| Misi Ke-3 | Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif | 237,594,080,374.00 | 246,707,523,752.50 |
| 1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 13,462,500,000.00 | 20,661,365,550.00 |
| 2 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1,326,500,000.00 | 496,742,050.00 |
| 3 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 362,600,000.00 | 291,367,216.00 |
| 4 | Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 26,728,000,000.00 | 21,300,681,600.00 |
| 5 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | 2,095,800,000.00 | 1,270,779,488.00 |
| 6 | Program pengendalian banjir | 26,703,022,850.00 | 26,803,341,840.00 |

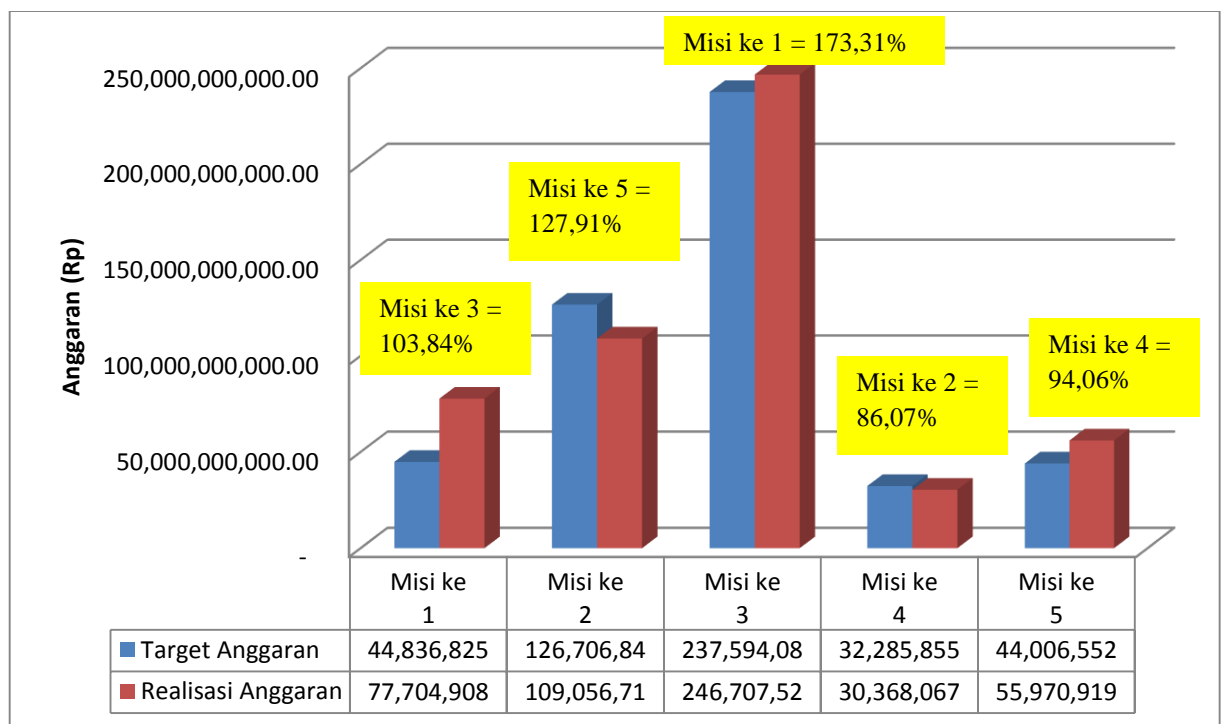
| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | Realisasi |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong | 6,500,000,000.00 | 19,562,466,112.00 |
| 8 | Program Pembangunan Pedestrian Kota | 8,500,000,000.00 | 6,971,708,800.00 |
| 9 | Program Keselamatan Pengguna Jalan | - | 1,065,449,420.00 |
| 10 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 820,000,000.00 | 689,178,100.00 |
| 11 | Program Penerangan Jalan Umum | 34,200,000,000.00 | 49,588,152,062.00 |
| 12 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 116,895,657,524.00 | 98,006,291,514.50 |
| Misi Ke-4 | Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif | 32,285,855,685.00 | 30,368,067,916.00 |
| 1 | Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | - | - |
| 2 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 314,050,000.00 | 153,859,048.00 |
| 3 | Program penataan struktur industri | 24,836,491,685.00 | 16,658,463,595.00 |
| 4 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 78,026,000.00 | 27,500,000.00 |
| 5 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi | 66,600,000.00 | 4,132,000.00 |
| 6 | Program penciptaan iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif | 50,000,000.00 | 88,140,000.00 |
| 7 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 100,000,000.00 | - |
| 8 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | - | - |
| 9 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | - | - |
| 10 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 200,000,000.00 | 50,089,900.00 |
| 11 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | 93,700,000.00 | 84,138,500.00 |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar | 250,000,000.00 | 2,486,795,800.00 |
| 13 | Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar | 1,199,870,000.00 | 2,458,634,000.00 |
| 14 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | 359,600,000.00 | 356,888,000.00 |
| 15 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya | 2,288,441,000.00 | 3,717,464,200.00 |
| 16 | Program pengembangan destinasi pariwisata | 698,241,000.00 | 692,685,500.00 |
| 17 | Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata | 1,120,836,000.00 | 2,135,057,308.00 |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | Realisasi |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 18 | Program pengembangan kemitraan | - | - |
| 19 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | - | - |
| 20 | Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan | - | - |
| 21 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | - | - |
| 22 | Program Kemudahan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal serta Perizinan | 440,000,000.00 | 695,379,000.00 |
| 23 | Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan | 190,000,000.00 | 168,409,385.00 |
| 24 | Peningkatan produksi pertanian | - | 590,431,680.00 |
| 25 | Peningkatan produksi Perikanan | - | - |
| 26 | Program Pemanfaatan Biomassa | - | - |
| 27 | Program Pengembangan City Gas | - | - |
| Misi Ke-5 | Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 44,006,552,660.00 | 55,970,919,160.00 |
| 1 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 4,969,232,300.00 | 4,135,863,508.00 |
| 2 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah | 625,450,300.00 | 532,962,538.00 |
| 3 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | 1,598,250,000.00 | 1,031,703,600.00 |
| 4 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | 2,774,330,000.00 | 1,387,974,300.00 |
| 5 | Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur | 1,193,407,000.00 | 1,344,843,858.00 |
| 6 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | 3,005,975,000.00 | 507,025,071.00 |
| 7 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah | 17,092,450,000.00 | 32,900,805,328.00 |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 9,009,225,765.00 | 10,325,116,079.00 |
| 9 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | - | - |
| 10 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 206,300,000.00 | 197,747,800.00 |
| 11 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1,677,950,600.00 | 1,454,830,090.00 |
| 12 | Program Penataan peraturan perundang-undangan | 798,713,900.00 | 496,740,950.00 |
| 13 | Program Bantuan Hukum | 539,517,795.00 | 712,013,556.00 |

| No | Misi dan Program Tahun 2017 | Anggaran | Realisasi |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 14 | Program Perencanaan Pembangunan Bid. Pengembangan dan Perekonomian perkotaan | 465,750,000.00 | 848,472,482.00 |
| 15 | Program Perencanaan Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur | 50,000,000.00 | 94,820,000.00 |
| 16 | Program Perencanaan Pengendalian Pembangunan | - | - |
| JUMLAH | | 485,430,162,287.00 | 519,808,131,966.45 |

Berdasarkan tabel 3.9. tersebut, bahwa realisasi anggaran pada program yang digunakan untuk pencapaian 10 sasaran dan 20 IKU Kota Balikpapan mengalami peningkatan realisasi dari target anggaran pada Misi ke-1 sebesar 173,31% dan Misi- 3 sebesar 103,84% dan Misi ke-5 sebesar 127,91% sedangkan capaian realisasi kurang dari target anggaran pada Misi ke-2 sebesar 86,07%, dan Misi ke-4 sebesar 94,06%.

Terkait urian diatas, target dan realisasi anggaran pada perjanjian kinerja dapat dilihat pada tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.21

Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2017

Berdasarkan capaian realisasi anggaran pada 5 (lima) Misi tersebut, bahwa jumlah keseluruhan realisasi mencapai Rp. 519,808,131,966.45 atau meningkat sebesar 7,08% dari target anggaran perjanjian kinerja Wali kota Balikpapan sejumlah Rp. 485,430,162,287.00

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2016, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 40 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2017

| NO | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT | INSTANSI YANG MEMBERIKAN | PENERIMA |
|----|--|----------|--------------------------|---|
| 1 | Peringkat Terbaik Ke-2 Anugerah Pangripta Nusantara 2017 (APN) | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Bappeda Litbang |
| 2 | Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Inspektorat |
| 3 | Panji Keberhasilan Bidang Keterbukaan Informasi Publik | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas Kominfo |
| 4 | Panji Keberhasilan Bidang Industri | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian |
| 5 | Panji Keberhasilan Bidang Perdagangan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas perdagangan |
| 6 | Panji Keberhasilan Bidang Koperasi | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian |
| 7 | Panji Keberhasilan Bidang Dekranasda | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian |
| 8 | Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu |
| 9 | Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu |
| 10 | Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas perhubungan |
| 11 | Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| 12 | Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan Kota | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| 13 | Panji Keberhasilan Bidang Kesehatan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas kesehatan kota |
| 14 | Panji Keberhasilan Bidang Tata Kelola Kearsipan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas arisp dan perpustakaan |

| NO | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT | INSTANSI YANG MEMBERIKAN | PENERIMA |
|----|--|----------|--------------------------|---|
| 15 | Panji Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Bagian pemerintahan |
| 16 | Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | TP-PKK |
| 17 | Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas lingkungan hidup |
| 18 | Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 19 | Panji Keberhasilan Bidang Pariwisata Kategori Kota | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 20 | Terbaik II Bidang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Bagian pemerintahan |
| 21 | Terbaik II Bidang Pembangunan Hukum dan HAM | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Bagian Hukum |
| 22 | Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | BNN Kota |
| 23 | Terbaik II Bidang Keberhasilan Pengelolaan e-Government | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas Kominfo |
| 24 | Terbaik II Bidang Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana |
| 25 | Terbaik II Bidang Apresiasi Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| 26 | Terbaik II Bidang Perpustakaan dan Minat Baca | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas arsip & perpustakaan |

| NO | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT | INSTANSI YANG MEMBERIKAN | PENERIMA |
|----|---|----------|--------------------------|---|
| 27 | Terbaik II Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Bagian Organisasi |
| 28 | Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pertanahan dan penataan ruang |
| 29 | Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana |
| 30 | Terbaik III Bidang Keolahragaan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas pemuda olahraga dan pariwisata |
| 31 | Terbaik III Bidang Penanggulangan Kemiskinan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas Sosial |
| 32 | Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Bagian pemerintahan |
| 33 | Terbaik III Bidang Prestasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM |
| 34 | Terbaik III Bidang Ketenagakerjaan | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Dinas Tenaga Kerja |
| 35 | Peringkat I Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Prov. Kaltim | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Kelurahan Baru Ilir |
| 36 | Peringkat III Lomba Camat Berprestasi Tingkat Prov. Kaltim | Provinsi | Pemerintah Prov Kaltim | Kecamatan Balikpapan Timur |
| 37 | Pembina Pelayanan Publik Terbaik | Nasional | Kemenpan & RB | Walikota |
| 38 | Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik | Nasional | Kemenpan & RB | Disdukcapil |
| 39 | Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik | Nasional | Kemenpan & RB | RSUD Balikpapan |

| NO | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT | INSTANSI YANG MEMBERIKAN | PENERIMA |
|----|--|----------|--------------------------|----------|
| 40 | Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik | Nasional | Kemenpan & RB | DPMPT |

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2017 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Tabel 4.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis | Tingkat Rata-rata Capaian (%) | Capaian IKU Terhadap Sasaran Strategis | Hasil |
|----|--|-------------------------------|--|----------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan | 100,73 | Melampaui target | Tercapai |
| 2 | Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan | 100,01 | Melampaui target | Tercapai |
| 3 | Menurunnya jumlah pengangguran | 76,97 | Kurang dari Target | Tidak Tercapai |
| 4 | Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan | 94,95 | Kurang dari Target | Tidak Tercapai |
| 5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 103,50 | Melampaui target | Tercapai |
| 6. | Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan | 111,46 | Melampaui target | Tercapai |

| No | Sasaran Strategis | Tingkat Rata-rata Capaian (%) | Capaian IKU Terhadap Sasaran Strategis | Hasil |
|-----|--|-------------------------------|--|----------------|
| 7. | Terwujudnya infrastruktur yang handal | 104,13 | Melampaui target | Tercapai |
| 8. | Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat | 104,68 | Melampaui target | Tercapai |
| 9. | Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 99,20 | Kurang dari Target | Tidak Tercapai |
| 10. | Tata kelola pemerintahan yang baik | 112,60 | Melampaui target | Tercapai |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 10 sasaran strategis beserta indikatornya, pencapaian sasaran strategis atas capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017 secara keseluruhan tercapai dengan realisasi sebesar 75% tercapai dan 25% kurang tercapai dari 20 IKU yang diperjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan.

Sehubungan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 menunjukkan kategori sangat baik di 15 indikator dengan capaian kinerja sesuai dengan target dan melampaui dari target, akan tetapi terdapat 5 indikator kinerja yang masih perlu perhatian dan upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan untuk ditingkatkan, yakni :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Kemiskinan
3. PDRB Perkapita
4. PDRB Non Migas
5. Survey Kepuasan Masyarakat

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.



Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, Januari 2017
WALI KOTA BALIKPAPAN

H. M. RIZAL EFFENDI

**PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2017**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|-----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka Harapan Lama Sekolah | 10,45 13,73 |
| 2. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan | 1. Usia Harapan Hidup | 73,96 |
| 3. | Menurunnya jumlah pengangguran | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja | 5,55% 63,28 |
| 4. | Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan | 1. IPM 2. Tingkat Kemiskinan 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 78,33 2,34 91 |
| 5. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 59,18 |
| 6. | Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan | 1. <i>Livable City Index</i> | 72,5 |
| 7. | Terwujudnya infrastruktur yang handal | 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar | 75,00 |
| 8. | Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat | 1. Indeks Gini Ratio 2. PDRB perkapita | 0,34 Rp 137,51 (Juta) |
| 9. | Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 1. PDRB non migas | Rp 42,62 (Triliun) |
| 10. | Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1. Opini laporan keuangan 2. Indeks Persepsi Korupsi 3. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Nilai Evaluasi LAKIP 5. Penilaian Kepatuhan 6. Indeks Profesionalitas ASN | WTP 6,62 79,56 CC 55 83 |

| No | Program | Anggaran |
|---------------|---|-----------------------|
| Misi 1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi | 44,836,825,233 |
| 1 | Program pendidikan non formal | 6,771,120,000 |

| No | Program | Anggaran |
|---------------|--|-------------------------------|
| 2 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 1,025,233,500 |
| 3 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 4,766,610,000 |
| 4 | Program Pendidikan Dasar | 5,219,000,000 |
| 5 | Program Pendidikan Menengah | 1,588,321,233 |
| 6 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 272,475,000 |
| 7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| 8 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak | |
| 9 | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | |
| 10 | Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan | 13,116,255,000 |
| 11 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 903,697,500 |
| 12 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 325,255,000 |
| 13 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 143,307,000 |
| 14 | Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu | 4,352,965,000 |
| 15 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 1,733,144,000 |
| 16 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 536,384,500 |
| 17 | Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan | |
| 18 | Program Keluarga Berencana | 1,877,361,000 |
| 19 | Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | 1,032,253,000 |
| 20 | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) | 214,097,500 |
| 21 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | 461,948,000 |
| 22 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak | 497,398,000 |
| | | |
| Misi 2 | mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan | <u>126,706,848,335</u> |
| 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | 912,090,000 |
| 2 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 126,910,000 |
| 3 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 1,309,465,000 |
| 4 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2,125,000,000 |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 125,000,000 |
| 6 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 42,964,625,000 |



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-14/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator Kinerja Utama 2016-2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berisi sasaran strategis dan indikator utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya mengacu pada indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT** : Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk:
- Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - Indikator Kinerja Utama 5 (lima) tahun dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - Penetapan Kinerja setiap tahun dituangkan dalam dokumen yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan diketahui Wali Kota.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Januari 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- Inspektur Kota Balikpapan;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 NOMOR 188.45-14/2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Asumsi bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan tidak mengalami penurunan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. | $RLS = \frac{P_{25+}}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-}i)$ Keterangan : RLS = Rata-rata Lama Sekolah P ₂₅₊ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun keatas Lama Sekolah Penduduk ke-i = terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD s.d. S1 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir | BPS, Disitkubud | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator/Kinerja Utama(IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) | Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh anak di Balikpapan | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. | $HLS_a = FK \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p>Keterangan : HLS_a = Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah</p> | BPS, Disdikbud, Disdukcapil | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan | 3. Angka Harapan Hidup (AHH) | Mengetahui derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHHmencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. | AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010 | BPS, Dinkes, Disdukcapil | Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu |
| 3. | Menurunnya jumlah penganggaran | 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan di Kota Balikpapan | Nilai Persentase (%) jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja | $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ | BPS, Distriker, Disdukcapil | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Mengetahui potensi angkatan kerja yang tersedia di Balikpapan | Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. | $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun +}} \times 100\%$ | BPS, Disnaker, Disdukcapil | Dinas Ketenagakerjaan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan | 1. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) | <ul style="list-style-type: none"> mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. | <p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, dan sebagainya.</p> | $IPM = \sqrt[3]{I_{pendidikan} \times I_{keselamatan} \times I_{pendapatan}}$ <p>Dimensi pembentuk IPM :</p> $I_{pendidikan} = \frac{RLS+HL\bar{E}}{2}$ <p>$I_{keselamatan}$ = Nilai Rata-rata atas =</p> $I_{pendapatan}$ = Angka Harapan Hidup (AHH) $I_{pendapatan} = PDRB \text{ Perkapita}$ | BPS, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, DPPPAKB |
| | | 2. Tingkat Kemiskinan (TKm) | Mengetahui proporsi penduduk miskin di Kota Balikpapan | Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan | $TKm = \frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$ | BPS, Disdukcapil | Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan |
| | | 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Mengetahui tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pencapaian dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketumpangan gender. | $IPG = \frac{1}{3} [(X_{ges(1)} + X_{ges(2)} + \text{inc-dis})]$ <p>Keterangan :</p> $X_{ges(1)}$ = Xede untuk harapan hidup $X_{ges(2)}$ = Xede untuk harapan pendidikan Inc-dsi = indeks distribusi pendapatan | BPS, DPPPAKB Disdukcapil | DPPPAKB |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|---|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Mengetahui Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan | IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu daerah, dimana Tujuan disusunnnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>Keterangan : IPA = Indeks Pencemaran Air Sungai IPU = Indeks Pencemaran Udara</p> | DLH, Bappeda Litbang | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup |
| 6. | Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan | 1. Livable City Index (LCI) | Mengetahui tingkat kenyamanan suatu kota berdasarkan persepsi warganya. | Kota layak huni atau <i>Livable City</i> adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahlweg (1997), kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Menurut Evan (2002), konsep <i>livable city</i> digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya. | Metode pengukuran kualitas atas penilaian <i>Livable City Index (LCI)</i> oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), yang menilai tingkat kenyamanan hidup kota-kota di Indonesia. | Bappeda Litbang | DPP, DPU, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator-Kinerja Utama(IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|---|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Terwujudnya infrastruktur yang handal | 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar | Mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah | Hasil pengujian diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala 1-10) | Bappeda Litbang | DPU, Dishub Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang |
| 8. | Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat | 1. Gini Ratio (GR) | Mengetahui pemerataan pendapatan berdasarkan kelas pendapatan Kota Balikpapan | Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. | $GR=1-\sum_{i=1}^n f_i[Y_i+Y_{i+1}]$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Σf_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas Ke - i Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. | BPS, Bappeda Litbang | Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bag. Perekonomian |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|---|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita | Mengetahui nilai tambah produksi per penduduk Kota Balikpapan | Merupakan alat (<i>tool</i>) ukur kinerja pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (<i>quantitative change</i>) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita | $\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$ | BPS, Bappeda Litbang | Bappeda Litbang |
| 9. | Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas | Mengetahui nilai tambah produksi kota Balikpapan tanpa memperhitungkan sektor migas | Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah tanpa sektor migas | $\text{PDRB Non Migas} = \frac{\text{PDRB} \text{ tanp Migas}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$ | BPS, Bappeda Litbang | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas DPMPT, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dasar Pencapaian IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| 10 | Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1. Opini laporan keuangan | Mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah | Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Tidak Wajar dan Tidak menyatakan pendapat | 6 | 7 | 8 |
| | | 2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | Mengetahui persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis | <i>Corruption Perception Index (CPI)</i> atau Indeks Persepsi Korupsi merupakan indeks komposisi yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. | Indikator Indeks Persepsi Korupsi menggunakan Skala numerik untuk mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia. Disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup, 10 sangat bersih | Inspektorat, Bappeda, Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Inspektorat, Bappeda, Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dasar Penetapan IKU | Definisi | Metode Pengukuran IKU | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|---|---|--|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan | Mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan | Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. | Survei Kepuasan Masyarakat terukur atas Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan oleh Tim penyusunan indeks kepuasan masyarakat atau unit independen yang sudah berpengalaman, perlu dilakukan melalui "Perjanjian kerja sama" dengan unit independen seperti BPS, Perguruan Tinggi, LSM . Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). | Perangkat Daerah se Kota Balikpapan | Bappeda Litbang |
| | | 4. Nilai Evaluasi AKIP | Mengetahui penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Balikpapan | Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik | Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan Skala Skoring: AA = 90 - 100 A = 80 - 90 BB = 70 - 80 B = 60 - 70 CC = 50 - 60 C = 30 - 50 D = 0 - 30 | BPS, Bappeda Litbang, Bagian Organisasi | Bappeda Litbang |

KEGIATAN BIMTEK SILAKIP







APLIKASI PERENCANAAN KOTA BALIKPAPAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

The image displays two parts of the BAPPEDA Balikpapan website. The top part is a login page with a dark red background. It features the logo of the 'SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN' (Construction Planning Information System) on the left, which includes a hand icon holding a globe. Below the logo is the text 'Selamat datang di aplikasi ePlanning Kota Balikpapan, silahkan login dengan akun anda.' (Welcome to the Balikpapan ePlanning application, please login with your account). The login form consists of two input fields labeled 'Username' and 'Password', followed by a blue 'LOGIN' button and a link for 'Lupa password?' (Forgot password?).

The bottom part is a header banner with a dark background and a cityscape. On the left, it features the official logo of 'KOTA BALIKPAPAN' and the text 'PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN'. The main title 'SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN' is written in large, white, bold letters. On the right side of the banner, there are two portraits of officials in white uniforms and black caps. Below the portraits are social media icons for Instagram and Facebook, with the handles '@bappedalitbangbpn' and 'www.bappeda.balikpapan.go.id' respectively. At the bottom right, the logo and name 'BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN' are displayed.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



**MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN**

TAHUN 2017

